

Sejarah Kota Tual¹

[Sterly R. Loupatty]²

Abstrak

Kota Tual merupakan salah satu kota yang telah lama dikenal dan disinggahi oleh orang-orang yang datang dari luar yang datang untuk mencari rempah-rempah di kepulauan Maluku. Secara geostrategis Kota tual memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah. Dengan peralatan yang serba terbatas serta menggunakan tanda-tanda alam sebagai sarana pendukung maka, kecendrungan untuk melakukan pelayaran antar pulau untuk menuju Maluku dipandang sebagai sesuatu yang sangat efektif. Dengan menggunakan metode ini maka dengan sendirinya pulau-pulau yang terlebih dahulu disinggahi adalah pulau-pulau disebelah selatan. Dalam penelusuran sejarah Kota Tual tidak dapat dipisahkan dari sejarah perniagaan dan perdagangan rempah-rempah dimasa lalu. Perjalanan panjang sejarah Kota Tual tidak dapat dipisahkan dari masuk dan berkembangnya pengaruh bangsa Eropah. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara turut memberikan dampak bagi perjalanan sejarah kota-kota di Nusantara. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada berbagai tinggalan baik secara fisik maupun non fisik (kebudayaan) yang hingga kini masih dapat dijumpai. Dimensi lain yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah posisi dan kedudukan Kota Tual dimasa kemerdekaan khususnya dalam masa orde baru hingga reformasi yang merupakan suatu periodisasi sejarah yang tidak dapat dilepas pisahkan dari perjalanan panjang sejarah Kota Tual.

Kata Kunci : Sejarah Kota Tual

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan sebuah kota selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan-perubahan itu terjadi secara direncanakan maupun tidak direncanakan dalam upaya menjawab kebutuhan semua orang yang ada dalam wilayah teritorialnya. Perubahan yang terjadi bukan hanya kepada fisik semata tetapi juga pada dimensi sosial yang didalamnya terjadi perubahan dalam dimensi sejarah kota tersebut. Sebagai salah satu daerah dengan kondisi geografisnya kepulauan membuka ruang untuk terbentuknya wilayah-wilayah pemerintahan baru di Maluku. Terbentuknya pusat-pusat pemerintahan dan perdagangan merupakan

¹ Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2011

² Teknis Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon

suatu fakta sejarah yang mesti mendapat perhatian dalam historiografi kota di Maluku.

Penulisan sejarah kota di Kepulauan Maluku yang ditulis oleh para penulis oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda cenderung melihat pada kota yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti Ternate, Tidore, Bacan, Ambon, Banda dan Saparua dan mengabaikan rekonstruksi sejarah kota-kota lain yang ada dalam gugusan kepulauan Maluku. Namun sesungguhnya terdapat sejumlah daerah yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting dan strategis untuk dikaji dalam penelusuran jalur pelayaran dan perniagaan dari dan ke Maluku hingga terbentuknya pusat-pusat perdagangan dan pemerintahan di Maluku. Penelusuran sejarah kota di Maluku lebih cocok dikaji dalam suatu pendekatan kewilayahan (gugus pulau) hal ini dipengaruhi oleh letak geografis kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau baik yang besar maupun kecil.

Perjuangan untuk menemukan kepulauan rempah-rempah (spice island) telah dilakukan oleh pelaut-pelaut dari luar (Asia dan Eropah) sejak dulu. Hal inilah yang kemudian membuka pusat-pusat pemerintahan baru dengan ciri-ciri khas yang melekat berdasarkan kebudayaan yang dikembangkan. Munculnya agama dan kebudayaan-kebudayaan baru menjadi suatu fakta sejarah yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap penulisan sejarah kota. Fenomena ini muncul merata disetiap pusat-pusat pemerintahan dan perdagangan (kota) yang ada di nusantara. Hal ini sebagai suatu dampak dari proses akulturasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Fakta sejarah ini yang kemudian diwariskan hingga sekarang ini. Hal yang paling nampak serta dijumpai ialah kebudayaan Timur Tengah dan kebudayaan Eropah yang masih melekat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu ajaran agama Islam dan Kritten.

Kota Tual merupakan salah satu kota yang telah lama dikenal dan disinggahi oleh orang-orang yang datang dari luar yang datang untuk mencari rempah-rempah di kepulauan Maluku. Secara geostrategis Kota tual memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah. Dengan peralatan yang serba terbatas serta menggunakan tanda-tanda alam sebagai sarana pendukung maka, kecendrungan untuk melakukan pelayaran antar pulau untuk menuju Maluku dipandang sebagai sesuatu yang sangat efektif. Dengan menggunakan metode ini maka dengan sendirinya pulau-pulau yang terlebih dahulu disinggahi adalah pulau-pulau disebelah selatan. Dalam penelusuran sejarah Kota Tual tidak dapat dipisahkan dari sejarah perniagaan dan perdagangan rempah-rempah dimasa lalu.

Perjalanan panjang sejarah Kota Tual tidak dapat dipisahkan dari masuk dan berkembangnya pengaruh bangsa Eropah. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara turut memberikan dampak bagi perjalanan sejarah kota-kota di Nusantara. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada berbagai tinggalan baik secara fisik maupun non fisik (kebudayaan) yang hingga kini masih dapat dijumpai. Dimensi lain yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah posisi dan kedudukan Kota Tual dimasa kemerdekaan khususnya dalam masa orde baru hingga reformasi yang merupakan suatu periodisasi sejarah yang tidak dapat dilepas pisahkan dari perjalanan panjang sejarah Kota Tual.

Sebagai salah satu Ibu Kota Kabupaten dalam masa kemerdekaan (orde baru), Tual memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan diseluruh kepulauan Maluku tenggara. Selain sebagai ibu Kota kabupaten Maluku Tenggara, Tual dijadikan sebagai tempat untuk menjangkau pendidikan dan tempat untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik. Terbukanya akses transportasi laut turut membarikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kota Tual turut mendapatkan keuntungan yang besar dengan membawai daerah-daerah yang ada di Kepulauan tenggara. Hal ini kemudian memberikan dampak yang kurang baik bagi daerah-daerah yang jauh dari pantauan pemerintah akibat luas wilayah dengan karakteristik kepulauan, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang begitu besar.

Berhembusnya angin reformasi yang dikumandangkan oleh mahasiswa turut memberikan dampak bagi penyelenggaran pemerintahan di negeri ini. Bergulirnya berbagai aturan dan kebijakan pemerintah untuk menjawab problematika dan dinamika ke-Indonesiaan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengungan revormasi inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut dengan otonomisasi daerah. Konsep otonomisasi daerah sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam penyelenggaran pemerintahan di republik ini, namun proses penerapan otonomisasi daerah yang ditetapkan pemerintah merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menjawab berbagai pelayanan yang belum terjangkau secara baik akibat rentan kendali (jarak yang jauh).

Konsep otonomisasi daerah ini merupakan sumbangsi pemikiran Riad Rasid yang sesungguhnya belum tuntas untuk dibahas, namun menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar. Momen inilah yang membuka angin segar bagi seluruh daerah di Nusantara yang selama ini terabaikan dari aspek pembangunan untuk

memekarkan diri menjadi suatu daerah yang otonom. Dalam arak-arakan itu pada tahun 2007 Kota Tual secara resmi dimekarkan menjadi suatu daerah yang otonom dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kota tual. Perjalanan panjang untuk mendapat suatu legalitas sebagai daerah otonom membuka babakan baru dalam perjalanan sejarah Kota Tual yang patut dikenang dalam coretan sejarah ini.

2. Permasalahan

Merangkai penggalan masa lalu dalam suatu historiografi adalah penting dalam suatu kehidupan manusia atau masyarakat. hal ini dilatar belakangi fungsi sejarah (masa lalu) sebagai cermin untuk menata masa kini dan masa depan. Terbentuknya suatu pemerintahan yang membentuk sebuah kota merupakan suatu fase sejarah yang patut mendapat perhatian dalam penulisan sejarahnya. Sejarah Kota Tual misalnya, yang sejak dulu dikenal dalam dunia pelayaran dan perniagaan dari dan ke Maluku pada masa perdagangan rempah-rempah, sampai terbentuknya Tual sebagai suatu Ibu Kota administratif akan menjadi suatu historiografi yang menarik dan penting bila dirangkai. Dalam penulisan sejarah di Maluku sejarah terbentuknya Kota sangatlah kurang, bahkan hampir tidak ada.

Fenomena lain yang nampak dalam penulisan sejarah di Maluku ialah, sejarah daerah-daerah di kepulauan Maluku Tenggara sangatlah terbatas. Untuk itulah penulisan sejarah Kota Tual ini kaji sebagai suatu historiografi yang mungkin dapat dipakai untuk menjadi rujukan dalam merekonstruksi barbagai peninggalan sejarah yang ada di Kepulauan Maluku Tenggara. Historiografi Kota Tual ini mencoba melihat Kota Tual dalam beberapa masa (fase). Bertolak dari uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah:

- Bagaimana proses terbentuknya Kota Tual?

3. Tujuan

Adapun tujuan daalam penulisan ini antara lain:

1. Dapat mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya Kota Tual?
2. Dapat mengetahui bagaimana proses pembangunan dan perkembangnya hingga sekarang ini?
3. Sebagai bahan dan data dalam rangka penyebarluasan informasi dan publikasi?

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu ruang lingkup oprasional dan ruang lingkup materi. Rung lingkup oprasional mencakup

operasional penelitian sejarah terbentuknya Kota Tual. Sedangkan ruang lingkup materi mencakup sejarah terbentuknya Kota Tual.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat untuk mendukung proses penulisan ini, maka

menggunakan beberapa metode pengumpulan data dilapangan antara lain:

1. Metode Wawancara : yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi menyangkut aspek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.
2. Observasi : merupakan satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk memperoleh data, informasi yang akurat, selain itu observasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kamera foto guna mendukung proses di lapangan (dokumentasi)
3. Studi kepustakaan : pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan dengan aspek yang diteliti (sejarah terbentuknya Kota Tual)

II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Tual terletak pada posisi 5° dan 6,5° lintang selatan dan 131°50 dan 135°15 bujur timur. Gugusan pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kota Tual terdiri dari empat kelompok yaitu; Kei besar, Kei kecil, Pulau Tayando dan Pulau Kur dengan jumlah luas keseluruhan pulau-pulau itu berkisar 1500 km². Kei kecil dan Tayando dianggap sebagai dataran rendah yang banyak tanaman, di pulau utama mejulang sampai ketinggian 100 m. Kur mencapai 400 m. Hanya Kei besar yang seluruhnya bergunung dengan pantai curam dan memiliki berbagai puncak gunung. Tempat berlabuh yang baik di Kei besar hanya terletak di pantai barat dan hanya bisa digunakan di musim kemarau. Di Kei kecil, Tual di pantai barat merupakan tempat berlabuh yang terbaik dan sekaligus menjadi pusat perdagangan yang melalui pembukaan sejumlah kantor perusahaan milik orang cina menjadi ramai.

2. Iklim dan Kondisi Tanah

Seperti halnya daerah-daerah lain di Maluku Tenggara, Kota Tual memiliki dua musim dalam satu tahun yakni musim barat (musim panas) dan musim timur (hujan). Dalam dua musim yang dialami, turut mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat khususnya petani. Dimana pada musim timur masyarakat

memanfaatkannya untuk bercocok tanam seperti jagung dan berbagai umbi-umbian dan pada musim barat (kemarau) masyarakat kurang melakukan aktifitas bercocok tanam karena dipengaruhi curah hujan yang terbatas.

Jenis dan karakteristik tanah Kota Tual dibagi atas tiga jenis yaitu litsol, rensina, dan podsolik. Tanah jenis pertama bertekstur sedang dan berdrainase baik. Ciri utama tanah ini adalah terdapat singkapan batuan di atas permukaan tanah yang terbuka dan semak belukar. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah rensina, kambisol, brunizem dan podsolik. Vegetasi yang dijumpai adalah hutan sekunder, primer, dan tanaman campuran setahun. Sedangkan jenis rensina memiliki solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang sampai halus dan berdrainase baik. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah litosol, kambisol, brunizem dan podsolik. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan sekunder, primer dan tanaman campuran. Tanah jenis podsolik memiliki solum tanah dalam sampai sangat dalam, dengan tekstur halus dan berdrainase baik. Tanah ini berasosiasi dengan jenis-jenis tanah kambisol, litosol dan brunizem. Vegetasi yang di temukan adalah tanaman pertanian, tanaman campuran (tanaman hutan dan ladang), hutan sekunder dan primer.

3. Penduduk

Berbicara mengenai suatu kota tidak dapat dilepas pisahkan dengan keberadaan penduduk sebagai suatu komponen yang terpenting dalam membentuk dan mengendalikan kota tersebut. berbicara mengenai penduduk dalam kehidupan masyarakat di Maluku tidak terlepas dari latar belakang mitologi yang begitu kuat melatarbelakangi sejarah asal-muasal manusia (penduduk) suatu daerah. Mitos-mitos inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk mengungkap berbagai fakta sejarah yang ada dibalik berbagai permasalahan tentang asal-usul suatu masyarakat. mitos-mitos yang melatarbelakangi hal inipun selalu didekatkan pada kosmologi masyarakat setempat tentang alam lingkungan sekitarnya seperti, atas-bawah (langit bumi), laut-darat dan pohon maupun benda-benda yang dianggap memiliki nilai kesakralan.

Cara pandang ini merupakan satu bentuk perilaku hidup masyarakat nusantara, yang hidup dengan berbagai dinamika kebudayaan yang melatarbelakangi kehidupannya. Cerita tentang lima orang bersaudara yang turun dari kayangan (Hian, Togil, Parpara, Bikel dan Maslaang). Tempat persinggahan mereka itu di daerah Wuat (Pulau Kei Besar/ Nuhu yal uat), tempat persinggahan mereka itu hingga kini sangat disakralkan oleh masyarakat. ketika mereka turun dari kayangan tempat itu telah berpenghuni. Asal mula orang-orang (manusia) itupun beragam, ada yang keluar dari batang mangga seperti Taslaan dan isterinya di Tuhu juga penduduk lain yang diyakini berasal dari dalam air, tanah seperti ferne

dan Rian serta pakaian mereka terbuat dari kulit kayu khususnya penduduk Nuhu Roa (Kei Kecil).

Selain cerita manusia yang berasal dari kayangan, pohon, tanah dan air ada pula cerita mengenai asal mula nenek moyang masyarakat Kei yang bersal dari berbagai tempat seperti Pulau Seram, Gorong, Banda, Timor dan Bali. Campuran lapisan masyarakat inilah yang kemudian membangun suatu persekutuan hidup dengan berbagai pranata-pranata sosial yang bersifat mengatur dan mengikat setiap individu maupun kelompok yang ada dalam ikatan tersebut dan lebih dikenal dengan suatu tata aturan hukum adat *Larwul Ngabal*.

Istilah Kei (Kai) merupakan suatu gelar sosial yang telah dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Istilah ini muncul ketika bangsa Eropa tiba di kepulauan ini, maka terjadi komunikasi antara orang-orang asing dan penduduk asli. Dalam interaksi tersebut orang Eropa menanyakan apa nama pulau tersebut, karena tidak paham dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang asing itu maka masyarakat setempat menjawab dengan menggunakan dialeg setempat "*kai waaid*" yang artinya tidak tahu, sehingga dipahami oleh orang-orang asing tersebut bahwa sesungguhnya pulau itu bernama kai, yang kemudian dipakai untuk menamai gugusan kepulauan itu dengan sebutan kai, yang lambat laun mengalami perubahan dialektika menjadi Pulau Kei. (wawancara dengan Bapak Beni

4. Agama dan Kepercayaan

Sebelum masuknya pengaruh luar dengan agama-agama yang dibawa, pada mulanya masyarakat setempat menganut sistem kepercayaan primitif. Tradisi kehidupan ini dimiliki semua masyarakat yang ada di Nusantara, yang ditandai dengan perilaku-prilaku hidup yang nomaden serta sistem kepercayaan dinamisme. Keyakinan akan pengaruh roh atau kuasa lain diluar kekuatan manusia masih kuat mempengaruhi kehidupan manusia, serta Keyakinan pada roh-roh orang mati (leluhur) sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. praktek-praktek animisme dan dinamisme lebih nampak dalam praktek hidup tiap-tiap hari khususnya dalam kegiatan berburu, keyakinan akan kuasa pada kayu, batu dan suatu benda jika benda tersebut dapat digunakan untuk membunuh binatang buruan. Selain itu keyakinan akan terdapatnya tempat-tempat yang keramat dan dihuni oleh makhluk halus sangatlah kuat. Dalam kosmologi orang Kei, matahari dan bumi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, dimana matahari dipahami sebagai sosok laki-laki dan bumi dipahami sebagai perempuan.

Pengaruh animisme dan dinamisme mulai kurang dirasakan dalam kehidupan masyarakat setempat setelah masuk dan berkembangnya agama Islam di Kepulauan Kei. Dalam penuturan sejarah, ajaran agama yang pertama kalinya masuk dan berkembang di daerah ini ialah ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan para mubalig yang datang untuk berdagang serta menyebarkan ajaran agama Islam. Penyebaran agama Islam. Pada dasarnya penyebaran Islam di Nusantara berjalan dengan mudah, hal ini dikarenakan dengan mengucapkan kalimat syahdat orang telah memeluk ajaran Islam. Hal yang lain dari proses penyebaran Islam ialah, terbukanya ruang untuk mengembangkan kebudayaan lokal, dengan kata lain memeluk agama Islam orang tidak semerta-merta meninggalkan kebudayaannya.

Pengaruh Islam di Kepulauan Kei dimulai pada daerah-daerah yang ada dipesisir, khususnya pulau Dulah. Terbukanya pelabuhan sebagai sarana perniagaan dan perdagangan menjadi embrio masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Kepulauan Kei. Ketika perburuan rempah-rempah dilakukan oleh pelaut-pelaut Eropa dengan mencari kepulauan rempah, munculah berbagai ekspedisi laut yang dilakukan. Berpetualang dengan berbagai ancaman dan tantangan dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan dalam perdagangan rempah-rempah, akhirnya pada tanggal 11 November 1512 menemukan Kepulauan Banda (M. Wakim 2011:11). Hal inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi penyebaran Agama Roms Khatolik di Maluku termasuk di Kepulauan Kei. Agama khatolik diperkirakan masuk ke Kepulauan Kei sekitar 1889 yang ditandai dengan dilaksanakannya permandian terhadap salah satu putri raja Langgur yang bernama Maria Zakabauw yang dipilih oleh Imam Johannes Kusters. Untuk memperingati perjalanan sejarah masuknya agama Khatolik di Kei, dibangun sebuah taman ziarah 100 tahun makam MGR Johannes Arts MSc dan kawan-kawan yang diresmikan oleh Gubernur Maluku Bpk S. Soekoso pada tanggal 7 Juli 1989 (laporan kegiatan Lawatan Sejarah Daerah Maluku 2009:9)

Kedatangan bangsa Belanda ke Maluku membuka suatu babak sejarah baru dalam kehidupan masyarakat di Maluku termasuk pada aspek kepercayaan dan agama. Agama Kristen Protestan yang dibawa oleh bangsa Belanda kemudian disebarkan oleh para sending dan guru-guru jemaat yang direkrut dari masyarakat pribumi. Dalam perkembangannya agama merupakan suatu peninggalan masa lalu yang diwariskan secara turun temurun. Pengaruh budaya luar inilah yang hingga kini sangat dirasakan kuat dalam kehidupan masyarakat Kei, dengan memeluk ajaran agama Islam, Khatolik dan Kristen Protetan.

III. Tual Dalam Dinamika Sosial

1. Terbentuknya Persekutuan Lor Lim dan Ur Siu.

a. Persekutuan Ur Siu

Persekutuan Lor Lim dan Ur Siu sesungguhnya merupakan suatu proses yang lahir dari penetrasi antara budaya lokal dan budaya asli kelompok ini sesungguhnya berakar pada masuknya pendatang dari pulau Seram dan Bali yang kemudian menjadi penduduk asli asumsi ini di dasarkan pada sejaras asal mula penduduk masyarakat Kei yang di yakini juga berasal dari pulau Seram. Migrasi masyarakat dari pulau Seram ini turut membawa arus budaya yang ada di pulau Seram. Salah satu kebudayaan yang di bawa ialah kelompok yang selalu di identikan dengan angka sembilan dan lima yang lebih di kenal dengan istilah Lor Lim dan Ur Siu. Hal yang sama juga di jumpai dalam kehidupan masyarakat di pulau Seram yang selalu melakukan pengelompokan pada asalnya dari rumpun Pata Siwa dan Pata Lima.

Ketika masuknya pendatang dari Bali telah terbentuk pemerintahan-pemerintahan Adat di kepulauan Kei. Cerita Putri Dit Sak Mas yang bermukim di patai Barat pulau Kei kecil tepatnya di Letvuan menjadi salah satu pendorong terbentuknya persekutuan Ur Siu di kepulauan Kei Kecil, Pulau Dula, dan Pulau Kei Besar. Terjadinya pertemuan antara sembilan Halaai yang di prakasai oleh Tabtut untuk membicarakan perdamaian dan keamanan di Pulau ini. Dari pertemuan-pertemuan ini lahirlah aturan-aturan tentang tata cara hidup yang lebih cenderung teratuar. Peristiwa ini di tandai dengan di sembelinya seekor kerbau yang bagian tubuhnya di bagi-bagikan kepada para Raja (Halaai). Sejak itulah persekutuan ini di kenal dengan istilah Ur Siu.

b. Persekutuan Lor Lim

Terbentuknya Persekutuan Lor Lim tidak terlepas dari pengaruh masuknya pendatang dari Bali dan Raja-Raja atau Halaai di bagian selatan Kei Besar. Pertemuan lima orang Halaai tersebut yang di prakasai oleh Halaai Kasde berhasil merumuskan ketetapan-ketetapan Hukum yang kemudian menjadi suatu konsensus bersama dalam kehidupan masyarakat Adat di Kepulauan Kei. Persekutuan ini di tandai dengan ditanamnya tombak Bali (Nabal) dan disembelinya seekor Naga (ikan paus) yang bagian-bagian tubuhnya di bagi-bagikan kepada para Halaai yang hadir dalam pertemuan di itu. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Lor Lim.

2. Terbentuknya Hukum Larwul Nabal

a. Hukum Larwul

Terbentuknya persekutuan adat masyarakat Kei erat kaitannya dengan latar belakang sejarah lahirnya hukum adat Larwul Ngabal yang sesungguhnya merupakan fondasi sosial masyarakat Kei. Hukum ini merupakan suatu konstruksi sosial untuk mengatur dan menata pola hidup dan perilaku masyarakat Kei yang pada mulanya (sebelum pendatang dari Bali tiba) telah menganut suatu bentuk hukum dolo. Hukum ini lebih menjurus pada tindakan-tindakan yang tidak berprikemanusiaan sehingga menimbulkan kekerasan dikalangan masyarakat Kei (Pattikayhatu, dkk 1998:39-40). Perilaku hidup yang penuh dengan kekerasan serta pemberlakuan hukum rimba menjadi realitas masyarakat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Kei, setelah masuknya pendatang (orang-orang dari Bali) membuka babakan sejarah baru dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei dengan terbentuknya suatu tata aturan yang mengikat dan mengikat pola hidup masyarakat yang dikenal dengan hukum *larwul ngabal*.

Secara etimologis larwul ngabal dapat diartikan sebagai: lar berarti darah, ada juga yang menyebut dengan layar, wul berarti merehseandakan, nga berarti tombak dan bal berarti Bali, dengan kata lain Larwul Ngabal dapat diartikan sebagai ***tombak berdarah merah dari Bali***. Arti hukum larwul ngabal ini sesungguhnya menggambarkan suatu latar belakang sejarah lahirnya hukum larwul ngabal di Kepulauan Kei, yang dalam penuturan tua-tua adat dan tokoh masyarakat Kei menjelaskan bahwa arus migrasi masyarakat dari Bali yang datang ke Kepulauan Kei dibawah pimpinan kasdeu dan istrinya bernama Dit Rangil beserta empat orang anaknya yaitu Tabtut, Fadirsamai, Atman dan seorang anak gadisnya Ditsakmas. Mereka memasuki teluk Sorbay di pantai barat Kei Kecil, dan menyinggahi pantai Letvuan sekarang. Atas persetujuan masyarakat setempat mereka mendirikan suatu kampung di bukit yang agak tinggi dan diberi nama Ohoivuur yang berarti kampung diatas bukit.

Masuknya migrasi penduduk dari Bali ke Kepulauan Kei sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Soendhono dalam A.rasyid Asba dkk 2011:143, dalam abad ke-14 kerajaan Majapahit meluaskan pempunyaannya dibawah kekuasaan Gajah Mada. Sehingga Maluku termasuk Kei terhitung pula sebagai wilayah kerajaan Majapahit akan tetapi pada tahun 1478 kerajaan termasyur itu runtuh sama sekali ketika raja Kediri Giridradradhana merebut kekuasaan, pada waktu itulah Majapahit menjadi kacau balau dan rakyatnya menjadi kacau balau.

Dalam perjalanannya halai Kasdeu digantikan oleh anaknya Tabtut. Pada saat tabtut menjadi raja di Ohoivur, sudah terdapat beberapa halai yang sudah memerintah di Kepulauan Kei, tetapi halai-halai tersebut hanya berkuasa pada daerahnya masing-masing. Katika Tabtut berkeinginan untuk meluaskan kekuasaannya maka para halai digerakan menuju suatu persekutuan dan struktur pemerintahan. Keinginan Tabtut untuk melaksanakan keinginannya dilatar belakangi oleh perjalanan adik bungsunya Ditsakmas yang melakukan perjalanan untuk mencari tunangannya Arnuhu seorang laki-laki yang memiliki keahlian dalam membuat perahu di Kampung (desa) Dandar. Perjalanan inilah yang sesungguhnya merupakan babakan sejarah awal terbentuk dan lahirnya hukum ada larwul ngabal di Kepulauan Kei. Sehingga dalam perjalanannya hingga kini pendatang dari Bali sesungguhnya memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan hukum adat larwul ngabal yang dengan sendiri mengatur dan mengikat semua orang yang ada dalam wilayah kepulauan Kei untuk tunduk dan taat pada ketetapan-ketetapan hukum tersebut.

Terbentuknya hukum larwul ngabal itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melakukan suatu perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei yang sesungguhnya telah memiliki suatu bentuk hukum dolo (rimba) yang dengan sendirinya mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Prilaku ini menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi masyarakat dengan mengalami berbagai kekerasan-kekerasan dan ancaman yang datang dari orang-orang diluar kelompoknya. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pendatang dari Bali (Tabtut) menunjukkan sesungguhnya kehadirannya mampu menembusi sekat entitas lokal masyarakat yang ada di Kepulauan Kei.

Perjalanan ditsakmas untuk mencari tunangannya Arnuhu di desa danar pada mulanya mengalami kegagalan karena barang perbekalannya dirampok ditengah jalannya sehingga Ia tidak melanjutkan perjalanannya, barulah pada perjalanan yang kedua kalinya Ia menemukan tuangannya di kampung Dandar. Dalam perjalanannya yang kedua Disakmas menaru ujung daun kelapa putih, (tumbak daun kelapa) dalam keranjang perbekalannya (yatfar). Tumbak kelapa putih yang merupakan suatu tanda larangan untuk mengambil barang-barang tersebut yang dalam dialeg orang Kei disebut dengan istilah hawear. Hawear adalah tanda yang berfungsi untuk melindungi hak milik seseorang. Istilah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya aturan ini mengatur tentang hak kepemilikan seseorang yang tidak boleh diambil (dicuri) oleh orang lain tanpa izin. Prilaku ini menunjukkan suatu bentuk kesadaran masyarakat Kei tentang suatu pengakuan terhadap kepunyaan orang lain berdasarkan ketetapan hukum adat yang dianut sehingga tercipta

keselarasan hidup diantara sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Setelah Ditsakmas menemukann tunangannya di Danar, maka Ia menceritakan peristiwa yang dialaminya dalam perjalanan, hal ini kemudian menimbulkan kemarahan dalam hati Arnuhu dan berniat untuk membalas apa yang telah dialami tunangannya itu pada para penjahat yang mengganggu tunangannya dalam perjalanan menuju ke Danar. Setelah bertemu dengan Arnuhu maka keinginan Ditsakmas pun tercapai, Ia dinikahi Arnuhu dengan tataaturan hukum adat perkawinan masyarakat Kei. Sesudah menikah beberapa waktu lamanya Ditsakmas berkeinginan untuk mengunjungui orang tua dan sanak saudaranya yang ada di Ohoiwur. setelah bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaranya Ditsakmas mencaritran apa yang dialami oleh dirinya dalam perjalanan menuju ke Danar.

Cerita perjalanan Ditsakmas inilah yang kemudian menginspirasi Halai Tabtut untuk melakukan suatu perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu yang lebih dikenal prilaku hidup dengan mengabaikan dimensi kemanusiaan. Ketidak pedulian pada hak-hak kemanusiaan orang lain serta kecenderungan untuk menerapkan pemberlakuan hukum rimba menjadi realitas kehidupan masyarakat Kei pada sat itu. Keprihatinan terhadap kehidupan masyarakat yang rusak inilah yang mendorong Halai Tabtut untuk memelopori suatu perubahan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat Kei secara mendasar menuju suatu masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang kuat dengan pengakuan terhadap hak-hak kemanusiaan orang lain. Proses inilah yang kemudian menjadi suatu fondasi sosial dalam merekonstruksi berbagai dimensi sosial lain dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei.

Kepedulian Halai Tabtut terhadap kehidupan masyarakat saat itu ditunjukan dengan sikap mengundang kesembilan Halai yang saat itu berkuasa di Pulau Kei Kecil dan Pulau Dulah untuk berkumpul di Elar untuk membicarakan dan merumuskan tata aturan adat yang mengatur prilaku kehidupan masyarakat sehingga tercipta suatu kehidupan yang aman, damai, tertib dan sejahtera. Para halai yang hadir dalam pertemuan itu anantara lain: Halaai Danar, Halaai Ngursoin, Halaai Elaar, Halaai Hoar Uun, Halaai Mastur, Halaai Ohoinoi, Halaai Ributat, Halai Ohoider dan Halai Wain. Dalam pertemuan para Halaai itu berhasil dirumuskan empat hukum dasar yang dipandang penting untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat kei untuk lebih baik dan teratur. Keempat hukum adat tersebut yang kemudian dikenal dengan nama *hukum larwul*. Untuk mengesahkan hukum tersebut sebagai suatu tataaturan yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat maka disembeli seekor kerbau yang merupakan perbekalan Ditsakmas dan bagian-bagian tubuhnya dibagi-bagikan kepada para Halaai tersebut.

Secara etimologis kata larwul dapat diartikan sebagai, Lar artinya darah dan wul artinya merah sehingga istilah larwul sendiri dapat diartikan sebagai darah merah. Karena Halaai yang berkumpul sembilan dan bagian tubuh kerbau itu dipotong menjadi sembilan bahagian sehingga kelompok Halaai ini (persekutuan ini) lebih dikenal dengan sebutan Kerbau siuw yang menampakan angka sembilan sebagai makna filosofis dalam persekutuan tersebut. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawah oleh leluhur masyarakat Kei dari Pulau Seram yang lebih mendekatkan suatu persekutuan masyarakatnya dalam dua rumpun budaya besar yaitu rumpun pata siwa dan pata lima, hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan tua-tua adat dan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa sebagian dari leluhur mereka berasal dari Pulau Seram. Sehingga dalam perjalanannya hingga kini para Halaai tersebut merupakan penggas dan peletak dasar terbentuknya hukum larwul yang merupakan hukum dasar dan rujukan bagi kehidupan masyarakat adat ursiuw (kelompok sembilan).

Hukum larwul sesungguhnya memiliki makna filosofis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta pengakuan terhadap hak-hak kemanusiaan manusia yang melekat dalam diri seseorang. Terbentuknya hukum ini menunjukkan betapa tingginya kesadaran dan tanggung jawab para halaai yang ada di wilayah kelompok Ursiuw untuk menciptakan suatu stabilitas keamanan dalam hidup bermasyarakat.

b. Hukum Ngabal

Latar belakang sejarah lahirnya hukum ngabal memiliki keterkaitan dengan pendatang dari Bali, namun sejarah ini dalam peristiwa dan pelaku yang berbeda namun memiliki sudut pandang yang sama yaitu upaya untuk menata kehidupan masyarakat untuk hidup dalam kondisi yang lebih baik (aman, nyaman, damai dan sejahtera). Kedatangan para pendatang dari Bali jika diteliti sesungguhnya tidak serempak namun bergelombang, hal ini dapat dipahami dengan kehadiran saudara Kasdeu yang bernama Jangra dan keluarganya di pantai barat pulau Kei Besar. Dalam kedatangan rombongan ini terdapat pula salah seorang putrinya Disomar. Kabar tentang kedatangan Jangradan keluarganya tersebar dikalangan masyarakat dipesisir barat Pulau Kei Besar sampai ke ujung Selatan Kei, terlebih kabar tentang putrinya yang cantik itu.

Kedatangan Jangra dan keluarganya didengar oleh lapisan masyarakat yang ada di Keibesar termasuk Wedifin seorang penduduk Ler Ohoilim. Kabar ini pun membangun suatu keinginan untuk bertemu dengan Jangra maka dibuatlah rakit yang terbuat dari pelapah pohon sagu (gaba-gaba) untuk menemui Jangra. Pertemuan antara Wedifin dan Jangra inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya hukum Ngabal. Setelah menetap beberapa hari di rumah Jangra wedifin mengetahui apa yang diinginkan oleh Jangra, maka Ia meminta agar jangra dapat menyerakan beberapa tombak yang dibawanya dari Bali untuk diantarkan ke Halaai Bamaf di Fer bersama-sama dengan putrinya Ditsomar, Keinginan Wedifin disetujui oleh Jangra.

Kedatangan Wedifin dan Ditsomar diambut oleh Halaai Bamaf dengan rasa yang gembira karena tombak tersebut diantarkan oleh putri Jangra sendiri. Kedatangan mereka disambut dengan upacara adat dan tombak yang dibawa ditanam di *Woma El Kel Buiy* yaitu pusat desa Fer yang dalam pemahaman masyarakat setempat dianggap sebagai suatu tempat yang suci atau keramat. Di tempat inilah sering dilaksanakan upacara-upacara adat yang penting seperti penyelesaian masalah pelanggaran hukum adat, pertikaian dan peperangan. Desa Fer inilah yang merupakan satu-satunya desa yang ditanami tombak yang dibawa oleh Jangra dari Bali.

Pertemuan yang dilakukan oleh Wedifin, Ditsomar dan Halaai Bamaf untuk mengatarkan tombak dari Bali tersebut secara tidak langsung telah menirimanya sebagai lambang hukum dalam wilayah Halaai Bamaf. Hal inilah yang kemudian mendorong prakarsa untuk mengumpulkan semua Halaai, Rat dan Orang kaya yang ada dalam persekutuan adat Lorlim di Kei Besar di Ler Oholim. Pertemuan bersejarah itu kemudian melahirkan tiga ketentuan hukum adat yang dikenal dengan sebutan hukum Ngabal yang dilambangkan dengan tombak dari Bali. Sebagai tanda bahwa hukum Ngabal akan diberlakukan di wilayah Lorlim Kei Besar maka Halaai Bamaf mengumpulkan suluruh halaai, Rat dan para orang kaya dan menyembelikan seekor ikan Paus (naga) yang terdampar di pantai Ler Ohoilim, bagian tubuh ikan paus (naga) tersebut dibagi-bagikan kepada para Halaai yang datang pada saat itu antara lain, Halaai Bamaf dari Fer mendapat kepala, Halaai Hibes dari Nerong mendapat perut, Halaai Ub ohoifak Uat-Mar mendapat ekor, Halaai Loon Lair dari weduar sayap dan Halaai Meljambak dari Rahangiar mendapat gigi.

Bagi masyarakat adat di Kepulauan Kei naga dan kerbau memiliki makna yang tersendiri dari berbagai binatang yang lainnya karena memiliki nilai kultural

yang memberikan gambaran identitas sosialnya khususnya yang ada dalam persekutuan Lorlim dan Ursiu. Ngabal berfungsi untuk melindungi hak-hak kemanusiaan seseorang serta upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta menjaga hak-hak orang lain. Kedua hukum ini (larwul dan ngabal) kemudian menjadi satu-satunya hukum adat yang dipakai dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei. Hukum inilah yang sesungguhnya merupakan suatu fondasi sosial dalam merekonstruksi berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei.

Ketentuan-ketentuan dalam Hukum adat larwul ngabal antara lain.

1. Uud Entauk Etvunad. Artinya: kepala kita bertumpuk pada pundak kita.

Dalam pandangan orang Kei kepala dipahami sebagai bagian tubuh yang paling penting dan tertinggi kedudukannya dari bagian-bagian tubuh manusia, hal ini pun di kaitkan dengan suatu sistem kepemimpinan yang berkewajiban untuk melindungi, memperhatikan, melihat, dan menjaga keselamatan anggota-anggotanya. Pemahaman ini didasarkan pada tiga sudut pandang yang mendasar antara lain:

- a. Uud (kepala) melambangkan pimpinan atau penguasa dalam hal ini pencipta (tuhan) pengatur manusia dalam tataran penguasannya. Hal ini memiliki makna suatu pengakuan terhadap adanya tuhan sebagai sang pencipta sehingga manusia harus menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjahui larangan-larangannya gambaran ini memperlihatkan kesadaran untuk memabangun suatu hubungan yang baik dengan sang pencipta.
- b. Uud (kepala) pada manusia adalah bagian tubuh yang letak tertinggi pada tubuh manusia dan pada kepala terdapat sebagian besar organ tubuh terpenting seperti mata, telinga, mulut, hidung dan otak yang semuanya memiliki fungsi penting seperti layaknya peran seorang pemimpin yang memiliki kesempurnaan untuk memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan-kecakapan yang wajib melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman bagi rakyatnya.
- c. Uud (kepala) terletak di pundak artinya: mengara pada hubungan antara orang tua dan anak. Pada aspek ini terjadi suatu keselarasan hidup yang menghendaki adanya suatu penghargaan, penghormatan, kepatuhan, dan ketaatan anak-anak kepada orang tua.

Pasal ini melihat kepemimpinan dalam tiga aspek yang mendasar yang sesungguhnya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai-nilai, religi, etika, sopan santun yang pada akhirnya terciptanya suatu kehidupan yang aman, damai dan tertip.

2. *Lelad Ain Fo Mahliling*. Artinya: kehidupan itu mulia, luhur, agung sehingga harus di lindungi (di jaga). Hukum ini lebih mengacu pada aspek kemanusiaan. Hak-hak hidup seseorang musti di akui dan di hormati selain itu hukum ini merupakan suatu upaya untuk melakukan penegakan kebenaran dalam menjalin harmonisasi pasal ini biasanya di pahami dalam dua arti.
 - a. Penghargaan, pengakuan terhadap prikemanusiaan yang mesti di akui
 - b. Leher dipakai sebagai suatu simbol kebenaranyang harus di tegakan dan kebenaran itu tak lain dari hukum adat itu sendiri.
3. *Ul Nit Envil Etumud*. Artinya kulit dalah pelindung badan, tubuh agar terpelihara dan tidak teercemara oleh penyakit lainnya. Makna pasal ini di dasarkan pada dua falsava orang kei tentang makna Ul Nit (kulit)
 - a. Sebagai selimut untuk menutupi aib seseorang dari kesalahan yang di perbuat agar tidak tercemar nama baik, karan nama baik orang harus di jaga dan tidak boleh di nodai dengan fitna.
 - b. Menebus kesalahan orang berupa harta benda atau barang berharga lainnya

Kedua falsava ini sesungguhnya memberikan ruang bagi terciptanya suatu keharmonisan yang dimulai dari suatu kesadaran untuk tidak melakukan fitnaan ataupun kesalahan kepada orang lain. Di sisi lain memberikan solusi bagi penyelesaian suatu masalah yang terjadi

4. *Lar Nakmot Ivud*. Artinya dara membeku / berkumpul dalam perut. Pasal ini lebih menegaskan tentang prilaku kejahatan yang pada ahirnya memberikan dampak pada pertumpahan darah. Pandangan ini memberikan suatu pemaknaan yang sangat jelas bahwa sesungguhnya tubuh manusia tidak boleh dilukai, sakiti apalagi dirsusaki baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga prilaku sewenang-wenang terhadap orang lain sangat mendapat larangan yang sangat keras.
5. *Rek Fo Kelmutun*. Artinya pembatas itu mulia. Pasal ini lebih mekakankan pada etika dalam pergaulan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Yang digambarkan dalam konstruksi sebuah rumah yang memiliki bahagian-bahagian tertentu dan tidak semua bagian itu dapat dikunjungi oleh orang lain. Pembatasan ini sesungguhnya mengarah pada hubungan sosial dalam kehidupan setiap hari khususnya bagi seorang perempuan atau anak gadis yang tidak boleh diperlakukan secara tidak sopan. Dalam kehidupan masyarakat Kei, perempuan (anak gadis) mendapat suatu penghargaan yang begitu tinggi dalam kehidupan tiap hari.

6. Moryain Fo Mailing. Artinya tempat tidur orang yang sudah kawin dan wanita bujang itu mulia dan agung. Pasal ini memiliki makna bahwa tempat tidur orang yang sudah menikah / wanita yang masi gadis tidak diperbolehkan untuk ditiduri atau di masuki oleh laki-laki lain atau menggunakannya. Hukum ini di dasarkan pada filosovis bahwa - suatu perkawinan itu suci yang telah terjadi sebagai suatu ikatan lahir batin untuk itu suatu perkawinan harus di hargai dan tidak boleh di nodai.
- Martabat dan keluhuran kaum perempuan di mata orang Kei sangat di junjung tinggi, di hargai dan dilindungi secara terhormat. Dua falsava inilah yang sesungguhnya mempengaruhi konstuksi sosial orang Kei dalam merumuskan pandangannya tentang sebua arti perkawinan dan perempuan dalam relasi-relasi sosialnya.
7. Hira ni fo ini, it did fo it did. Artinya milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita. Pasal ini lebih mengacu pada pengakuan terhadap hak-hak seseorang. Pasal ini mengatur sehingga tidak terjadinya kecurangan, ketidakadilan terhadap orang lain, dan mengatur relasi sosial tentang suatu kepemilikan yang pada akhirnya mgenimbulkan rasa aman, damai dan nyaman.

jika ditelah lebih dalam tuju pasal dalam hukum Larwul ngabal merupakan suatu perwujudan kesadaran orang Kei untuk merumuskan kaida- kaida hukum adat yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan bersama dengan mengadepankan aspek-aspek kemanusia, etika, religi, hukum, dan sopan santun yang semuanya itu bermuara pada kehidupan suatu tatan budaya orang Kei yang di pengaruhi oleh pengaruh kebudayaan dari Bali.

3. Sistem Pemerintahan Adat.

Terbentuknya sistem pemerintahan Adat di kepulauan Kei dapat di telusuri dalam kurun waktu dan periode sebelum terbentuknya Huku adat Larwul ngabal, setelah terbentuknya hukum larwul ngabal dan pengaruh masuknya bangsa Eropa di Kepulauan Kei. Ha ini dikarnakan adanya dinamika pemerintahan yang telah terbentuk sebelum terbentuknya hukum larwul ngabal dan kemudian dipengaruhi oleh kehadiran hukum larwul ngabal sebagai salah satunya landasan konstitusional yang lahir dari kesadara kultural masyarakat di kepulauan Kei serta pengaruh penetrasi bangsa Eropa dalam kehidupann masyarakat adat di kepulauan Kei.

a. Sistem Pemerintahan Adat Sebelum Terbentuknya Hukum Adat Larwul Ngabal

Sebelum terbentuknya hukum adat Larwul ngabal di kepulauan Kei sudah terbentuk sistem pemerintahan adat, namun sistem pemerintahan itu belum tertata secara baik. Pola hidup dengan mengendepankan hukum rimba lebih cenderung di tonjolkan dalam upaya mempertahankan eksistensi kelompok maupun pribadi. Dalam praktek hidup masa ini praktek hidup manusia memangsa manusia sangatlah kuat perlakuan yang kuat menguasai yang lemah, mayoritas menguasai minoritas menjadi dinamika yang sering nampak dalam perilaku-perilaku sosialnya. Pemukiman mereka biasanya terletak pada daerah-daerah yang sulit di jangkau dan dikelilingi oleh tembok-tembok batu yang di jadikan sebagai benteng pertahanan. Hal ini dikarenakan sering terjadi peperangan di antara sesama kelompok.

Para pendatang pertama yang mendirikan Ohoi (kampung) di sebut Toran nuhu yang secara etimologis di artikan Toran itu bapak atau orang tua dan Nuhu artinya tanah atau daerah yang kemudian mengalami perubahan istilah tuan tanah. Tora Nuhu sesungguhnya merupakan pimpinan non formal yang mengepalai Ohoi atau kampungnya untuk mempertahankan diri dari berbagai gangguan atau ancaman yang datang dari luar. Pendatang kedua yang menyatu dengan kelompok ini adalah Dir u yang artinya berdiri dimuka. Dalam penuturan para tua-tua adat dijelaskan bahwa pendatang kedua ini memiliki kepandaian dan kecerdasan hingga ia di serakan tanggung jawab untuk memerintah, sedangkan Tora Nuhu diberikan peran sebagai penasehat dan mengatur hal-halm yang berkaitan dengan masalah tanah. Dir U dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan nama menjadi Halai (orang besar) dan kemudian berubah lagi menjadi Orang Kay (orang kaya) yang bertugas untuk memimpin dan mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam melaksanakan tugasnya Orang Kay di bantu oleh para badan-badan pembantu antara lai: Wiska, Marin Wab-Wab, Ham-Ham Waat, dan Mitu Duan.

b. Fase Setelah Lahirnya Hukum Larwul Ngabal

Setelah terbentuknya hukum larwul ngabal dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat di kepulauan Kei, dimana pememimpin yang tertinggi dipegang oleh seorang rat (raja) yang memiliki daerah kekuasaan meliputi beberapa ohoi yang dipimpin oleh seorang halai. Pada fase ini tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang telah teratur derta memiliki rasa solider yang tinggi terhadap orang lain. Prilaku hidup yang menghargai hak-hak kemanusiaan orang lain menjadi realitas yang terwujud dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam prilaku hidup masyarakat.

ketetapan-ketetapan hukum larwal ngabal menjadi rujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan lebih baik.

c. Fase Masuknya Bangsa Belanda

Masuknya bangsa Eropa di Kepulauan Kei memberikan dampak yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Kei. Salah satu hal yang cukup mendapat pengaruh ialah sistem pemerintahan adat. Kepentingan politik untuk mencari keuntungan disetiap daerah jajahan menimbulkan berbagai kebijakan yang di pandang mendatangkan keuntungan bagi pihak penjajah. Perubahan yang cukup mendasar ialah perubahan pada nama kepemimpinan yang pada mulanya dipegang oleh seorang halaa'i diganti menjadi rat (raja). Untuk mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat, kebijakan lain yang ditempuh oleh Belanda ialah menggantikan raja-raja yang dianggap tidak berpihak kepada Belanda, sedangkan raja-raja dan orang kaya yang menyatakann dukungannya kepada Belanda diberikan kesempatan untuk memimpin masyarakatnya. Untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat dan pemerintahan di Kei, Belanda membagi wilayah Kepulauan Kei dalam tujuh belas Ratschap yang masing-masing ratschap di pimpin oleh seorang raja atau orang kaya yang dianggap dapat membatu pihak Belanda.

4. Stratifikasi Sosial dan Sistem Kekerabatan

Kehadiran para pendatang di kepulauan Kei mampu mengeser keberadaan penduduk asli sebagai penguasa. Karisma yang dimiliki oleh para pendatang dengan membawa berbagai peralatan yang dianggap sakral turut memberikan pengaruh bagi para pendatang untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Keahlian, kepiawaian dan kelicikan pendatang menimbulkan rasa hormat dan kepatuhan yang sangat besar, hal inilah yang kemudian memberikan ruang terjadinya proses stratifikasi sosial (pelapisan sosial). Pelapisan sosial dalam masyarakat adat di Kepulauan Kei sesungguhnya merupakan suatu migrasi budaya yang dibawah oleh nenek moyang mereka yang datang dari Bali.

Munculnya stratifikasi sosial khususnya dalam kehidupan masyarakat Tual disebabkan karena adanya pembagian hak, kekuasaan dan kewajiban antara penduduk asli dan warga pendatang. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Tual pada umumnya dikenal dengan istilah sistim kasta yang di kelompokkan pada tiga kelompok kasta yaitu:

1. Golongan Mel-mel
2. Golonngan Ren-ren
3. Golongan Ri-ri

Pengelompokan dalam sistim kasta ini denngan sendirinya memberikan status sosial pada masing-masing kelompok yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Golongan Mel-Mel

merupakan golongan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari golongan yang lain. Golongan ini biasanya diidentikan dengan pohon beringin yang tinggi, besar dan lebat serta memiliki dahan, ranting daun, bunga dan buah. Yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dari panas dan hujan serta memberikan makanan kepada burung-burung yang hinggap. Golongan ini tidak seluruhnya diberikan kekuasaan untuk memimpin, hanya kepada mereka yang dianggap sebagai kepala atau ketua dalam kelompoknya. Oleh karenanya itu golongan atau kasta ini memiliki sub-sub kasata (golongan) antara lain:

- a. *Mel Nuhu Duan*, adalah gelaran strata bangsawan dari penduduk asli.
- b. *Mel Bal Sumbau*, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Bali, Jawa, dan Sumbawa.
- c. *Mel Delo Ternat*, adalah gelar strata bangsawan penduduk Ternate, Tidore, dan Jailolo.
- d. *Mel Luang Mobes*, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Luang Mobes.
- e. *Mel-Mel Seran Ngoran Wadan Lair*, adalah gelar strata bangsawan penduduk pendatang dari Seram, Banda, dan Pulau-Pulau Watubela.

Selanjutnya strata Mel-Mel mempunyai nama berdasarkan fungsi atau pembawaannya yakni ada tujuh:

- a. *Mel Uun Ohoi Koran*, dalah strata bangsawan byang mempunyai pembawaan berbudi bahasa yang baik dan bijak.
- b. *Mel Kaba Ainar*, adalah strata bangsawan yang mempunyai pembawaan berkebesaran, cantik dan bagus.
- c. *Mel Kasil Vut Vut* adalah strata bangsawan yang berfungsi memahami sepuluh mata rumah.
- d. *Mel Kasil Memebean* adalah strata bangsawan yang dimiliki oleh hanya satu orang dalam satu desa tersebut.
- e. *Mel Ohoi Ratut* adalah strata bangsawan yang banyak orang memilikinya dalam satu desa.
- f. *Mel Yam'a (Yaman Aan)* adalah strata bangsawan yang berstatus tetua adat.
- g. *Mel Kak Watan Mu'ur Bong dan Abli Kaneuw* adalah strata bangsawan yang mempunyai julukan sebagai bangsawan yang berlaku curang dan bermulut besar dan berketurunan curang.

Selain gelaran tersebut diatas, ada juga gelaran Mel-Mel berdasarkan kebesaran dan keberaniannya yakni:

- a. *Mel Tolke Nabnabang* adalah strata bangsawan yang selalu di nanti dan dikawal.
- b. *Mel Unn Matan Sukat Saran (Dir' U Hammwang)* adalah strata bangsawan yang selalu menjadi contoh dan teladan bagi semua kalangan.
- c. *Mgel Ot Ot TAL, Kwaak Farmir / Voar Ot* adalah strata bangsawan yang suka bertukar, hartawan, dan mampu menggerakkan masyarakat.
- d. *Mel Hoban Ren Atar Mas* adalah strata bangsawan yang membawahan dengan strata Ren, Hartawan, vdan hidup bagaikan atau layaknya kakak-beradik.
- e. *Mel Ngel Yau Fulfut* adalah strata bangsawan yang bermarga besar, kuat, dan berani.
- f. *Mel Katlab Kanimun* adalah strata bangsawan yang mempunyai rumah dengan penuh kelengkapan dan perabotan di dalamnya.
- g. *Mel Tungun Pes Neran At Maan* adalah strata bangsawan yang tajam muka belakang.

Golongan Mel dalam strata teratas ini dapat dikatakan sebagai bangsawan yang berkuasa mutlak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. yang termasuk dalam golongan ini adalah para pendatang dan juga penduduk asli. Bangsawan penduduk asli di sebut dengan Mel Nuhu Duan, sedangkan bangsawan pendatang dengan nama Mel Kasil Tahit. Para pendatang di tempatkan pada kedudukan Mel-Mel karna oleh penduduk asli mereka dianggap sebagai orang lebih pandai/cakap sehingga diserakan kekuasaan karena mereka sebagai pimpinan. Bersama-sama dengan golongan Ren-Ren mereka menjalankan pemerintahan.

Oleh masyarakat golongan Mel-Mel ini diumpamakan sebagai pohon yang tinggi, besar dan rimbun, penuh bunga dan buah. Tempat berlindung semua makhluk hidup (burung maupun manusia). Pohon ini juga mempunyai akar dan batang yang mencari dan menyalurkan zat makanan keseluruh ranting dan daunnya. Dapat dicatat bahwa tidak semua mempunyai hak untuk berkuasa dan memerintah dalam sebuah negeri (kampung). Hanya satu mata rumah saja yang secara tradisional sudah di akui secara turun temurun.

b. Golongan Ren-ren

Strata sosial kedua ini diibaratkan sebagai pohon atau ibu (Ren adalah asal kata Renan-ibu) dan Ren diibaratkan sebagai induk pohon yang dinamakan strata sosial Mel yang diibaratkan sebagai pohon beringin tumbuh dan berkembang di situ sehingga menjadi besar dan rindang untuk tempat berlindung bagi setiap makhluk. Ren-Ren atau Rin-Rin mendapat nama julukan : Ren Kerbauw Wuar. Tidak terdapat sub-Kasta pada mereka. Disebut kerbau karena berdiam dan

berkuasa di gunung (Kerbauw disamakan denganKerbau gunung)Golongan dalam strata menengah ini adalah penduduk asli. Mereka, adalah yang pertama kali tiba disuatu wilaya. Penduduk asli ini di anggap sebagai pemilik atau penguasa di daerah, dan mereka dapat di katakan sebagai induk (Ren) dan suatu masyarakat.

Ren biasanya berkedudukan sebagai Tuan Tanah dan juga dapat bersama-sama dengan mereka menjalankan roda pemerintahan. Golongan Ren-Ren ini diungkapkan masyarakat ibarat batang pohon atau induk sebua pohon yang dari padanya hidup bagian atasnya yaitu golongan Mel-Mel. Jika batang pohon dan akarnya tidak kuat maka serangan angin dapat menumbangkan pohon tersebut. demikianlah kekuatan Mel atau golongan atas itu terletak pada golongan Ren-Ren yang dianggap sebagai saudaranya.

Pada mulanya Ren yang hidup dipegunungan atau pedalaman dan mereka disebut sebagai Ren Kerbau Vuar artinya kekuatan seperti tenaga kerbau yang mampu mengolah/ membajak tanah, menebas hutan dan berjalan turun naik gunung dan bukit. Pada umumnya mereka lebih menguasai keadaan daratan Pulau Kei. Dengan demikian kekuatan golongan Mel terletak pada dukungan Ren-Ren. Meskipun golongan Ren-Ren tidak terbagi atas su-sub kasta, namun masyarakat mengenal beberapa macam Roh sehubungan dengan tempat asal dan pengapdiannya kepada golongan Mel-Mel antara lain:

- Ren Kerbau Vuar, yaitu sebutan bagi RE-Ren pada umumnya.
- Ren Kerbau Hungar Nar-Nar, yaitu sebutan bagi Ren yang berani dan lihai dan segia besar berasal dari pulau Kur.
- Ren Bardik, yaitu Ren yang mengatur dirinya sendiri dan kekuatan dipercayakan kepada mereka karena alasanya Mel telah punah atau berpindah tempat.
- Ren Kerbau Memehan, yaitu sebutan bagi Ren yang tinggal bersama satu negeri(des).a).
- Ren Kerbau Siram Jatak, yaitu sebutan bagi Ren yang berda di bawa naungan Mel-Mel.

c. Golongan Ri-ri

Kata “Ri” berarti “Akar”, yang dihubungkan dengan pohon dimana akarnya mencari zat makanan untuk pohonnya. Jadi RI atau Iri-Ri dapat dihubungkan dengan orang-orang yang harus bekerja untuk tuannnya, artinya mereka ini dapat dipahami sebagai akar yang mencari makanan utuk pohonnya untuk itu Ri dapat dikatakan sebagai golongan yang mengabdikan diri pada Tuannya. Mereka ini dapat di pandang sebagai golongan yang kurang diindakan sebab dalam

kehidupannya mereka tidak bebas sepenuhnya dan harus bekerja keras untuk atasannya yaitu golongan Rrn-Ren atau Mel-Mel.

Stratifikasi yang berlaku di masyarakat Kei tidak mutlak ketat, sebab masih terdapat perbedaan-perbedaan antara satu kampung dengan kampung yang lain bahkan antara satu golongan dengan golongan kasta dengan kasta yang lain. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa para pendatang adalah semua orang yang pandai dan penduduk asli adalah orang yang dapat diperdaya atau mudah dikuasai. Hal ini disebabkan karena para pendatang pun belum tentu termasuk golongan Mel-Mel. Selanjutnya tidak dapat dikatakan bahwa semua Mel adalah penguasa dan semua Ren berada di bawah Mel. Demikian juga tidak semua Ri adalah orang yang harus mengabdikan diri Ren dan Mel karena dalam golongan Iri-Ri ada yang berdiri sendiri yaitu kelompok Iri Bordik. Mereka ini tidak diperhamba atau diperbudak oleh atasannya akan tetapi mereka tahu akan kewajiban dan tetap setia melaksanakan tugasnya kepada golongan Rn-Ren maupun Mel-Mel.

Ketiga golongan masyarakat Kei tersebut di atas dalam kehidupannya terikat pada ketentuan-ketentuan adat yang telah diatur dalam hukum adat Larwul Ngabal yang selama ini diwarisi secara turun-temurun.

5. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan khususnya pada masyarakat Tual, terdapat beberapa bentuk yang menjadi pola bagi sistem pengetahuan mereka yakni:

1. Kawin Minang (Tai Ret Yavut)

Bentuk perkawinan ini adalah perkawinan yang di hamparkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di daerah ini, khususnya di Tual. Karena Tipe atau bentuk perkawinan seperti ini dapat mengangkat martabat pelaku kawin minang, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan di mata masyarakat adat. Di satu pihak ukuran kemampuan keluarga sang pria terpublikasi melalui acara perkawinan terbentuk ini, di lain pihak kehormatan dan penghargaan yang merupakan pengakuan status sosial terhadap martabat kaum perempuan juga dapat diketahui.

Bentuk perkawinan ini berlangsung teratur dan terhormat sehingga penggunaan istilah sesuai tipe peminangan pun berbeda seperti: Dudung Ngail artinya memintah atau memohon secara terhormat; Hab Sol Vel tan artinya meminta secara terhormat sambil membawa tuak seta wadah talam yang berisikan harta kawin (mas kawin dan uang seperluhunya); Lenan Ret Fid artinya meminang secara terhormat melalui tangga masuk rumah atau pintu. Bentuk perkawinan peminang ini, mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipatuhi sesuai dengan adat masyarakat, agar menjadi terbentuk perkawinan yang paling terhormat dalam masyarakat Tual.

2. Kawin Lari

Jenis perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak disetujui oleh orang tua. Perkawinan ini biasanya terjadi karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama saling cinta dan tidak ingin dipisahkan oleh kehendak orang tua sehingga keputusan untuk mengambil perempuan sebagai istri tanpa restu orang tua merupakan pilihan dan solusi. Kawin lari dalam bahasa Kei disebut *menu u marai*, bentuk perkawinan kurang disukai karena mengandung resiko bahkan dapat menimbulkan masalah bahkan sampai pada terjadinya kontak dan kekerasan fisik. Perkawinan ini biasanya akan di restui orang tua apabila keluarga laki-laki akan menyelesaikan masalah dengan membayar arta sesuai ketentuan adat yang berlaku.

3. Kawin Masuk Rumah

Kawin masuk rumah dalam bahasa Kei biasanya disebut *Tub Riin*. Perkawinan ini terjadi karena laki-laki yang menikah akan mengikuti calon atau magra sang istri. Perkawinan ini biasanya terjadi karena dilatar belakangi beberapa faktor antara lain:

- Karena sang wanita merupakan anak satu-satunya dan disayangi oleh orang tua ataupun karena hubungan kekeluargaan sang pria dan orang tua sang wanita masih erat dan jugapertimbangan–pertimbangan khusus yang diajukan oleh orang tua wanita.
- Orang tua pria tidak memiliki harta bila dibandingkan dengan keberadaan orang tua wanita
- Anak laki-laki tidak dapat menyanggupi harta kawin yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan.

E. Maren atau Gotong Royong.

MarREN atau gotong royong merupakan wujud atau sikap hidup dari masyarakat Nusantara yang sudah terbina sejak berabad-abad hingga dewasa ini masih dan tetap di pertahankan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat adat adat Tual disebut M A R E N (HAMARE) yang artinya bakti (membagi kerja) maksudnya sesuatu pekerjaan biar seberat apapun tetap dapat dikerjakan oleh banyak orang maka dapat memberi hasil ganda baik itu kerja negeri, pekerjaan kelompok ataupun kerja perorangan akan tetapi memberi hasil yang memuaskan, jadi kerja bakti atau kerja sama ialah HAMAREN (MAREN) HAM = BAGI, MAREN = KERJA BAKTI. Dengan demikian didalam pelaksanaan HAMAREN ini apabila bersifat kelompok atau perorangan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. HAMAREN (MAREN) yang bersifat perorangan maka yang mempunyai kerja mendapatkan warga desa memberitahukan hari apa dapat dilaksanakan pekerjaan tersebut dan berlokasi dimana.
2. Menyongsongkan tiba waktu yang ditetapkan untuk MAREN dilaksanakan maka yang punya maksud kegiatan itu sudah harus mempersiapkan bahan berupa makanan dan minuman, alat yang di butuhkan apabila tidak dimiliki oleh mereka yang datang kerja bakti atau MAREN tersebut.

Kalau kerja yang hanya memakan waktu sejam dua jam maka yang punya pekerjaan menyiapkan tembakau/ rokok serta minuman saja, tetapi bila pekerjaan yang menelan waktu maka kelompok harus mengumpulkan bahan makan/minuman dll, karena pekerjaan berjalan sehari atau memakan waktu, oleh sebab itu diperlukan sekati jam dan hari kerja, alat kerja dll kebutuhan yang harus dipersiapkan lebih awal.

Pada zaman dahulu kala untuk mengetahui jumlah peserta yang ikut didalam HAMAREN tersebut maka seseorang di tunjuk membuat atau mempersiapkan WAAN yang terbuat dari sapu lidi berukuran 1 jengkal selanjutnya ia pergi menemui semua peserta MAREN dan ia memulai mengeluarkan WAAN tersebut sambil menghitung dengan menggunakan WAAN tersebut agar segera pula ia pergi melaporkan kepada ibu-ibu yang kerja mempersiapkan makanan. Setelah beristirahat maka makanan pun dibagi sesuai jumlah WAAN yang diserahkan oleh yang menghitung dan inilah perhitungan tradisional pada masa leluhur masyarakat Kei.

IV. Tual Dalam Lintasan Sejarah

1. Tual Dalam Masa Perdagangan Rempah-Rempah

Jejaring perdagangan rempah-rempah yang dirangkai dari Benua Eropa hingga ke Timur Asia telah terbentuk berabad-abad lamanya. Inspirasi untuk mencari dunia baru dalam berbagai ekspedisi laut dengan menantang bahaya oleh pelaut-pelaut dunia, kemudian diidentifikasi sebagai kepulauan Maluku. Hal ini didukung oleh argumen yang sangat kuat dengan terbangunnya motivasi untuk mendapatkan rempah-rempah yang tak lain adalah cengkih dan pala. Fakta ini didukung oleh pendapat Abdurachman yang mengatakan bahwa “ *pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk Pala dan Maluku untuk cengkih, dan barang perdagangan ini tidak dikenal dilain-lain tempat di Dunia lain kecuali di tempat-tempat yang disebut di; dan saya telah tanyakan dan selidiki dengan teliti apakah barang ini terdapat di tempat lain dan semua*

orang katakan tidak (Abdurachman,2008:122)” Jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia barat dan timur membuka babakan dan fakka-fakata sejarah baru. Lahirnya kebudayaan-kebudayaan baru melalui suatu proses akulturasi merupakan salah satu diantara bukti sejarah yang diyang timbul dalam lintasan sejarah panjang perdagangan rempah-rempah.

Terbentuknya jalur-jalur perdagangan sebagai suatu rute yang dilewati untuk menjangkau kepulauan rempah-rempah oleh para pelaut-pelaut ulung yang berkeinginan menjangkau Kepulauan Maluku. Jalur perdagangan untuk dari dan ke Maluku pada mulanya sangat dirahasiakan oleh pelaut-pelaut Cina yang diperkirakan lebih dahulu mienginjakan kakinya di Kepulauan rempah-rempah namun kepastian kedatangannya masi terdapat kesimpang siuran.Salah satu jalur pelayaran yang kenal dengan jalur selatan dan dilewati pedagang-pedagang dalam perdagangan rempah-rempah dari dan ke Maluku dimulai dari Malaka melewati Pulau Jawa dan seterusnya ke Bali menuju Lombok dan ke Kupang (Flores) masuk ke Kepulauan Maluku Tenggara menuju ke Banda dan seterusnya ke pesisir Pulau Seram dan menuju keHitu dan seterusnya ke Maluku Utara, setelah mendapatkan rempah-rempah kembali lagi melewati jalur yang sama. Jalur pelayaran dan perniagaan ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Usman Thalib dkk dalam bukunya ***dunia maritim orang-orang Banda*** yang mengukap bahwa jika pelayaran orang-orang Banda dari Malaka ke Maluku (banda) melalui pesisir timur sumatra kemudian ke Pantai Utara Jawa dan seterusnya ke Bali – Lombok – Nusa Tenggara – Maluku Tenggara dan ke Banda (Usman Thalib dkk 2006:34).

Pelayaran yang digunakan pada masa itu masih menggunakan peralatan yang seadanya serta dilengkapi pengetahuan yang sangat terbatas serta mengandung resiko. Jalur ini mulai mengalami perubahan ketika bamgsa Portugis menemukan jalur Utara dengan menaklukan kerajaan Goa dan Talo dan menjadikan Makasar sebagai pintu masuk menuju Kepulauan Rempah-rempah. dalam dunia pelayaran dan perdagangan rempah-rempah Tual bukanlah daerah yang menghasilkan barang dagangan yang dicari oleh para pedagang-pedagang yangg datang ke Maluku, namun Tual menjadi salah satu daerah yang disinggahi untuk mengisi perbekalan dan air bersih untu melakukan perjalanan selanjutnya. Persentuhan antara masyarakat Tual dengan para pedagang luar tersebut meberikan perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat Tual, yang ditandai dengan berkembangnya agama Islam di Tual khususnya di Kei Kecil (Nnegeri Dullah) sekitar tahun1500 (*J.Patikayhattu, 2008:5 Makalah pada seminar sejarah GPM*).

Dalam perjalanan panjang sejarah perdagangan rempah-rempah di Maluku orang-orang Kei (Tual) juga memiliki peranan yang sangat penting melalui kebiasaan-kebiasaan membuat kapal dan diperdagangkan kepada orang-orang Banda. Hal inilah yang kemudian membangun suatu keterjalinan sosial antara orang banda dan orang-orang Kei yang dilatar belakangi oleh perdagangan yang dilakukan. Sumber-sumber lisan maupun tulisan mengenai keterlibatan orang-orang Tual dalam percaturan perdagangan rempah-rempah sangatlah terbatas, hal ini dikarenakan oleh orientasi historiografi tentang perdagangan dan perniagaan lebih banyak diorientasikan pada daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah maupun tempat-tempat yang dijadikan sebagai pusat-pusat perdagangan pada masa itu sehingga banyak fakta dan jejak masa lalu yang terabaikan.

2. Tual Dalam Hgemoni Bangsa Eropa dan Jepang

a. Bangsa Portugis

Harumnya bunga cengkih dan pala menjadi pemikat dan pendorong dalam membangun motifasi yang kuat bagi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi laut dalam mencari kepulauan rempah-rempah. keinginan ini didorong motifasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbagai ekspedisi dilakukan untuk menemukan Kepulauan rempah-rempah namun mengalami kegagalan sebagaimana yang di ungkapkan Usman Thalib dalam Laporan Penelitiannya;“Upaya untuk menemukan Kepulauan penghasil buah Pala dan cengkih itulah yang mendorong Raja Spanyol memerintahkan Colombus Melakukan perjalanan laut melalui arah barat. Walaupun ia beserta armada yang dipimpinya tidak menemukan Kepulauan Maluku (Bannda Naira dan Ternate), namun mereka berhasil mendaratkan armadanya di benua baru yang dikenal sebagai Amerika. Upaya Vasco da Gama untuk melakukan pelayaran mengintari Tanjung Harapan di Benua Afrika dengan tujuan menemukan daerah penghasil buah pala itu, namun ekspedisi yang dilakuknya berahir dengan suatu kegagalan” (Usman Thaliib 2006:25-26).

Keinginan untuk menemukan Kepulauan Rempah-rempah selalu ditunjukkan oleh Bangsa Portugis yang terus berupaya melakukan ekspedisi laut. Pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque berangkat meninggalkan Portugis untuk menuju ke Asia dengan tujuan menemukan Kepulauan rempah-rempah. ekspedisi yang dipimpinya berhasil menemukan dan menaklukkan Malaka yang saat itu menjadi ramai dikunjungi para pedagang-pedagang Islam. Setelah berhasil menguasai Malaka Portugis mulai melakukan ekspedisi lanjutan untuk mencari Pulau Banda dengan mengirimkan dua armadanya yang dipimpin oleh de Abreu dan Francisco Serrau yang dibantu oleh seorang nahkoda melayu bernama ismail. Ekspedisi yang

dilakukan ini berhasil menemukan Kepulauan Banda dengan berbagai kisah perjalanan yang yang diungkapkan dalam buku catatan harian kapalnya dalam (Usman Thalib 2006:27)

“kami berlayar dari Malaka pada tanggal 11 November 1511 pada musim bertiunya angin barat. Sewaktu meninggalkan Malaka kami tidak banyak membawa bekal, karena peranayarang dengan Sultan Melayu masih berlangsung. Ternyata dalam pelayaran dua bulan lebih itu bekal yang kami bawa habis. Untuk mempertahankan hidup terpaksa segala yang ada di kapal dijadikan makanan, termasuk kecoa, tikus kapal dan keju busuk. Setelah dua bulan berlayar, pada pertengahan Januari 1512 tibalah kami di Kepulauan Banda Naira yang begitu indah. Begitu banyak petualang barat berupaya menemukan Kepulauan yang bagaikan surga dunia ini, yang kaya dengan pala, namun kami yang berjasa sukses menemukannya. Alangkah terperajatnya kami ketika mengetahui orang-orang Moro yang begitu lama berperang dengan kami dinegeri kami sendiri telah tiba di Kepulauan itu 100 tahun lebih dulu dari kami”.

Perjalanan Francisco serraui ini membuka tabir perjalanan rempah-rempah yang selama ini di rahasiakan keberadaannya oleh pelaut-pelaut Cina yang terlebih dahulu mengetahui jalur ini dan menyebutnya dengan sebutan jalur sutra. Banda kemudian dijadikan pintu masuk untuk menanamkan pengaruh serta upaya untuk menyebarkan ajaran Khatolik di bumi raja-raja, namun catatan-catatan historis mengenai keberadaan Portugis sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan Belanda. Di Kepulauan Kei catatan-catatan historis mengenai keberadaan Bangsa Portugis hampir tidak ada, namun pengaruh keberadaan bangsa Eropa ini sangatlah kuat yang dapat dijumpai dengan banyaknya pemeluk agama Khatolik yang dibawah oleh bangsa Portugis.

Data sejarah yang akurat menyangkut kapan bangsa Portugis tiba di Kepulauan Kei (Tual) tidaklah memiliki suatu kepastian, namun dari catatan penyebaran agama Khatolik mengungkap bahwa agama Khatolik masuk di Kepulauan Kei sekitar tahun 1889 yang ditandai dengan permandian salah satu putri raja Langgur yang bernama Maria Zakabauw yang dipilih oleh seorang misionaris yang pertama kali membawa misi khatolik di Kepulauan Kei. Catatan sejarah ini ditandai dengan dibangunnya sebuah taman ziarah 100 tahun masuknya Khatolik di Kepulauan Kei pada tahun 1989. Catatan sejarah bangsa Portugis tidak terlalu banyak di Tual sehingga untuk mengungkap keberadaannya dapat dilihat pada tinggalan-tinggalannya. Dari proses ini sesungguhnya Portugis tidak terlalu

mempublikasikan dirinya mungkin karena keberadaanya di Maluku sangatlah penndek dan tujuan mereka yang lebih difokuskan untuk mencari rempah-rempah.

b. Bangsa Belanda

Keberadaan Portugis di Maluku bertahan tidak begitu lama, setelah mengalami peperangan dengan Sultan Babulah di Ternate pasca terbunuhnya Sultan Hairun dan perlawanan masyarakat Leihitu di Pulau Ambon yang menyebabkan Portugis harus berpindah ke Jasirah Leitimor di Pulau Ambon dan mendirikan benteng Nosa Sendora A Nuciada sebagai pertahanan. Benteng inipun oleh masyarakat Leitimor dikenal dengan nama benteng Kota Laha. Benteng pertahanan Portugis ini kemudian direbut oleh Bangsa Belanda pada tahun 1605 dan menggantikan nama benteng tersebut menjadi Victoria yang artinya kemenangan. Sejak itulah Bangsa Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di bumi raja-raja ini.

Kehadiran Bangsa Belanda di Maluku tak lain dan tak bukan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam perdagangan dan monopoli rempah-rempah. aktivitas monopoli perdagangan rempah-rempah ini di motori oleh suatu badan dagang yang di sebut VOC. Berbagai upaya dan kebijakn dilakukan oleh Belanda untuk menjadi penguasa tunggal rempah-rempah di Maluku termasuk didalamnya upaya untuk menguasai daerah-daerah di Maluku yang dapat dijadikan sebagai akses dalam mempertahankan kekuasaannya. Tual merupakan salah satu daerah yang pernah dikuasai oleh Bangsa Belanda, walaupun Tual bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. kekuasaan Belanda di Kota Tual hampir kurang mendapat lirikn dalam berbagai Historiografi sejarah Indonesia maupun Maluku. Kurangnya data (terbatasnya penulisan) mengenai keberadaan Belanda di Kota Tual menjadi fakta Empiris akan hal itu.

Peristiwa-peristiwa sejarah pendudukan Belanda di Kota Tual seakan terhilang seiring berjalannya waktu, namun penulisan ini mencoba untuk mengungkap fakta-fakta sejarah keberadaan Bangsa Belanda di Kota Tual sebagai suatu rujukan untuk mengungkap berbagai peristiwa sejarah kehadiran Bangsa Belanda di bumi Larwul Ngabal. Mengenai kapan Bangsa Belanda tiba di Kota Tual tidak dapat dipastikan keberadaannya, namun berdasarkan data sejarah kehadiran Belanda di Ambon pada tahun 1605 dan di Banda pada tahun 1667 lewat perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda untuk menyerahkan Pulau Run yang ditukarkan dengan sebuah pulau jajahan Belanda di pantai Timur Amerika yaitu Nueuw Amsterdam (sekarang Manhattan-New York) diserahkan kepada Inggris (M.Wakim 2011:13).

Berdasarkan data ini dapat dijelaskan bahwa sekitar abad ke-17 Belanda sudah menanamkan pengaruhnya di Maluku termasuk Kota Tual. Kehadiran Belanda di bumi Maluku mendatangkan perubahan yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan termasuk sistem pemerintahan. Belanda membagi daerah-daerah di kepulauan Maluku dalam beberapa wilayah kekuasaan dengan tujuan mempermudah pengawasan secara langsung kepada masyarakat. Dalam catatan sejarah, Kota Tual pada Tahun 1948 merupakan salah satu pusat pemerintahan Belanda dengan status Afdeeling dibawah kekuasaan seorang asisten residen yang dibantu oleh seorang kontrolir yang dibagi dalam enam Onderafdeeling yaitu:

- **Onderafdeeling Kepulauan Kei**
Terdiri atas kelompok pulau Aru dan pulau-pulau sekitarnya, dibawah asisten residen kepala afdeeling.
- **Onderafdeeling Kepulauan Aru**
Terdiri atas kelompok pulau Aru dan pulau-pulau sekitarnya, dibawah seorang Gezaghebber atau pejabat kontrolir pemerintahan dengan kedudukan Dobo.
- **Onderafdeeling Kepulauan Tanimbar**
Terdiri atas pulau Jamdena dengan pulau-pulau sekitarnya, dibawah seorang Gezaghebber atau pejabat kontrolir pemerintahan dengan kedudukan Saumlaki.
- **Onderafdeeling Kepulauan Barat Daya**
Terdiri atas kepulauan Babar dan pulau-pulau sekitarnya termasuk pulau Wetan, seperti juga pulau-pulau Kisar, Moa, Wetar, Roma, Gunung api, Luang, Sermata dan Damar, disamping pulau-pulau kecil sekitarnya, dibawah seorang Gezaghebber atau pejabat kontrolir pemerintahan dengan kedudukan Wonreli.
- **Onderafdeeling New Guinea Selatan**
Terdiri atas bagian dari New Guinea Belanda di Tanjung Stenboom (pulau Naurio) sampai muara sungai Bensbach, dengan perkecualian daerah aliran hulu sungai Digul, dibawah seorang Gezaghebber atau pejabat kontrolir pemerintahan dengan kedudukan Merauke.
- **Onderafdeeling Boven Digul**
Terdiri atas daerah aliran sungai Digul, dibawah seorang kontrolir, seorang Gezaghebber atau seorang pejabat kontrolir pemerintahan selain dibawah seorang perwira angkatan darat dengan pangkat Gezaghebber atau pejabat kontrolir dengan kedudukan Tanah Merah.

Salah satu pengaruh kehadiran Bangsa Belanda di Kepulauan Kei ditandai dengan adanya penyebaran agama Kristen Protestan yang di bawah oleh para Zending dan guru-guru jemat yang direkrut dari masyarakat pribumi yang telah memeluk agama Kristen terlebih dulu khususnya yang ada di Kepulauan Lease. Dalam kehadirannya, Bangsa Belanda tidak hanya mengeksploitasi masyarakat pribumi namun juga membangun sejumlah fasilitas untuk kepentingan umum seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Belanda di Kota Tual ialah Rumah Sakit Kusta di Kei besar pada tahun 1946 hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Bangsa Belanda turut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pribumi..

c. Bangsa Jepang

Dalam pergulatan Bangsa-bangsa Eropa untuk mencari daerah jajahan baru muncul suatu kekuatan besar di Asia yang tampil dengan Slogan (Semboyan) gerakan 3A yaitu:

- Nipon Cahaya Asia
- Nipon Pelindung Asia
- Nipon Kekuatan Asia

Ditandai dengan Restorasi Meiji Jepang tampil sebagai kekuatan militer yang cukup disegani bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Setelah berhasil masuk melalui Tarakan, Jepang mulai melakukan Ekspansi kekuasaan keseluruhan daerah di Nusantara termasuk Maluku. Pilihan untuk membentuk pangkalan-pangkalan militer di Maluku tak lain hanya untuk memperkuat kekuatan militernya dalam menghadapi perang Pasifik. Dalam kehadirannya tentara Jepang mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan yang begitu mendalam bagi masyarakat, begitu banyak kekejian dan kebiadapan tentara Jepang yang terekam dalam fakta-fakta sejarah.

Dengan berkedok gerakan 3A yang dikumandangkan oleh Jepang serta dengan memanfaatkan keluguan masyarakat pribumi, Jepang dengan mudah menguasai wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 30 Juli 1942 Jepang berhasil mendarat di Kota Tual tepatnya di seputaran jembatan Watdek sekarang (panduan lawatan sejarah daerah Maluku tahun 2009). Data sejarah mengenai sumber pendaratan pasukan Jepang yang pertama kali di Kota Tual dan Kepulauan Kei pada umumnya belum banyak terekspose dan belum diketahui banyak orang. Kehadiran Bangsa Jepang di Bumi Larwul Ngabal ini dalam Misi interogasi terhadap para Misionaris yang ada di Kepulauan Kei. Setelah berhasil mendarat di Tual dengan beberapa armadanya, Jepang mulai melaksanakan misi interogasi dan pembantaian terhadap para Misionaris yang ada di Kepulauan Kei pada saat itu.

Lokasi pantai Langgur menjadi saksi sejarah proses eksekusi dan pembantaian terhadap beberapa Misionaris. Proses eksekusi dilakukan dengan mengikat tangan mereka pada posisi membelakangi tentera Jepang kemudian ditembak. Proses eksekusi ini berlangsung pada tanggal 30 Juli 1942. Mereka yang dieksekusi Jepang yakni Uskup Johannes Aerts MSc, Pastor Gerapus Barens MSc, Pastor Yakobus Akermans MSc, Pastor Yakobus Linotvet MSc dan delapan orang Bruder yang semuanya berkebangsaan Belanda. Ultimatum yang dikeluarkan Jepang agar mayat dari Para Misionaris yang telah tewas tidak diperbolehkan bagi warga masyarakat seorang pun untuk mengambilnya. Namun dengan keberanian warga, mayat uskup Johannes Aerts pertama diseret ke darat yang dilakukan pertama oleh Suster Agnes Maturbongs dan Suster Aloyyasia Resubun dan kemudian dilanjutkan oleh Sesvasubun, Marselius Lefan dan Izack Rehubun. Mayat dari para Misionaris tersebut kemudian dikuburkan disebuah lubang jeruk yang akan ditanami tanaman jeruk oleh Uskup Johannes Aerts. Demi menjaga rahasia tersebut maka diangkat sumpah yang dibuat oleh Raja Langgur Agustinus Renyut dirumahnya agar rahasia ini tetap terjaga. Kini lokasi pemakaman tersebut telah menjadi pusara yang abadi oleh para Misionaris.

Kekerasan-kekeraan dan kekejian Jepang dimasa lalu sesungguhnya menimbulkan traumatik bagi masyarakat pribumi baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak (mereka yang mengalami secara langsung dengan Jepang). Kekejian Jepang tidak mengenal batas dan mengabaikan hak-hak kemanusiaan orang lain. Akibat sikap Jepang kepada sekutu, pada bulan Agustus Kota Tual di bom oleh sekutu setelah rencana sebelumnya menyerang Papua Timur dan Australia tidak berhasil dilakukan karna jumlah pasukan yang terbatas. Kekejaman Jepang juga dirasakan dalam bentuk kerja paksa untuk membuat lapangan terbang Letvuan (sekitar bandar udara Umatubun sekarang). Dalam kehadirannya di Kota Tual, Jepang tidak begitu respect terhadap orang-orang Katolik karna pimpinan agamanya adalah orang Belanda yang merupakan Blok Sekutu. Hal ini menimbulkan rasa antipati yang besar kepada orang-orang yang memeluk agama Katolik, sehingga tak jarang mereka diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi.

3. Tual dalam zaman kemerdekaan

a. Masa Transisi dan Pemberontakan RMS

Dalam masa kemerdekaan terjadi pembenahan dan penataan pemerintahan, yang bertujuan untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, negara ini di bagi dalam dua

negara bagian yaitu RIS (Republik Indonesia Serikat) yang terdiri dari Jawa dan Sumatera serta NIT (Negara Indonesia Timur) dan terdiri dari delapan Provinsi yang didalamnya Provinsi Maluku ada, sehingga Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi tertua yang membentuk NKRI. Dalam masa ini secara De Jure kekuasaan Belanda di Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Namun secara De Facto masih terdapat pengaruh Belanda yang berupaya untuk menggoyahkan kedaulatan Indonesia dengan menggerakkan pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan Westerling, pemberontakan Andi Azis, serta upaya Soumokil untuk membentuk Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku.

Pemberontakan-pemberontakan ini menimbulkan gejala secara langsung dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Pemberontakan RMS di Maluku misalnya, mendatangkan berbagai tindakan-tindakan kekerasan dan teror bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pro NKRI. Ketidakstabilan keamanan dan sosial di Maluku mulai dirasakan sejak awal tahun 1950. Pada tanggal 25 April 1950 Soumokil berhasil menghimpun kekuatannya dan memproklamasikan berdirinya RMS. Untuk menuntaskan pemberontakan RMS pemerintah melaksanakan perlawanan fisik yang berhasil melumpuhkan RMS dan menguasai wilayah Maluku. Dalam masa ini Kota Tual tidak mengalami dampak secara langsung, hal ini dikarenakan pusat pemberontakan RMS lebih difokuskan pada Pulau Ambon, Buru, Lease dan Pulau Seram. Dalam masa-masa ini pemerintahan di Maluku secara umum ada dalam masa-masa transisi.

b. Tual Dalam Masa Pembebasan Irian Barat

Upaya untuk menyatukan seluruh daerah jajahan Belanda dan dijadikan sebagai suatu negara yang berdaulat tidak berjalan dan gampang seperti yang disepakati antara Belanda dan Indonesia, hal ini dikarenakan Belanda masih ingin mempertahankan status-quo atas wilayah Irian. Upaya perundingan Bilateral untuk membahas masalah Irian Barat dimulai sejak 25 Maret 1950. Pada tanggal 15 Desember 1950 dilaksanakan konferensi Uni Indonesia-Belanda di Den Haag, yang dalam Konferensi itu Indonesia mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat melalui tujuh pasal namun, usul itu ditolak oleh Belanda dengan alasan Nederland tidak dapat mengakui tuntutan Indonesia atas Irian Barat, bahkan sejak Agustus 1952 Belanda secara resmi memasukan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaannya.

Sejak kegagalan dalam perundingan Bilateral itulah pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat kedalam acara sidang majelis umum PBB secara berturut-turut pada tahun 1954 dan 1955. Namun, tidak pernah mendapat tanggapan positif. Pada sidang majelis umum PBB pada tahun 1957 Menteri Luar Negeri Indonesia mangancam bahwa akan menempuh jalan lain yang tidak sampai

pada perang dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Pada awal Januari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang bertujuan untuk memobilisasi kekuatan untuk pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1958 dalam ulang tahun kemerdekaan RI Presiden Soekarno menyatakan bahwa tahun 1958 adalah tahun tantangan dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Dalam menjalankan pembebasan Irian Barat Presiden Soekarno mengunjungi Kota Tual dan berpidato untuk membakar semangat masyarakat dan pemuda kota Tual, bahwa Irian Barat adalah Indonesia dan Tual adalah saudara kandungnya Irian Barat.

Dalam sengketa Irian Barat posisi atau letak geografis Tual sangatlah strategis, dimana Tual dijadikan sebagai pintu depan dalam memobilisasi pasukan untuk memasuki daerah Irian Barat. Upaya perebutan Irian Barat terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan berbagai pasukan untuk menduduki dan menguasai Irian Barat dalam operasi-operasi militer yang dilakukan. Dalam operasi militer yang dilaksanakan tidak sedikit masyarakat Tual yang dilibatkan sebagai penunjuk jalan dalam misi perebutan Irian Barat. Salah satu peristiwa perebutan Irian Barat yang menjadi fakta sejarah ialah peristiwa 15 Januari 1962 yang lebih dikenal dengan pertempuran laut Aru dengan gugurnya Komodor Yosudarso. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Bangsa Belanda.

c. Tual Dalam Masa Orde Baru

Dalam masa orde lama tidak banyak fakta sejarah mengenai Tual yang dapat diungkap, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Komunis yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menimbulkan instabilitas dalam Negara.
2. Letak geografis Tual (Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara) yang cukup jauh dari pusat Pemerintahan (Ibu Kota Provinsi) serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau daerah ini.

Dalam masa kemerdekaan di Maluku di bentuklah Dewan Maluku Selatan yang dalam Dewan ini terdapat sejumlah Tokoh-tokoh asal Maluku Tenggara yaitu: A.Koedoeboen, S.Pooroe, Hi.A.Gani Renuat dan B.Setitit yang berpendapat

bahwa letak geografis Maluku Tenggara jauh dari Ambon sebagai Ibu Kota Daerah Maluku Selatan yang menghendaki wilayah daerah Maluku Selatan dibagi dalam dua wilayah pemerintahan. Pada Tahun 1950-1951 sidang Dewan Maluku Selatan di laksanakan di Ambon, dan pada Tahun 1951 Gubernur Maluku Mr.J Latuharharry dengan menumpang kapal Kasimbar mengunjungi Maluku Tenggara. Pada kesempatan kunjungan itu Gubernur mengundang Tokoh-tokoh Maluku Tenggara untuk mengadakan pertemuan di atas Kapal Kasimbar dan menjelaskan bahwa tuntutan Tokoh-tokoh Maluku Tenggara akan dipenuhi dengan membagi daerah Maluku Selatan dalam dua wilayah yaitu Daerah Tingkat dua Maluku Tengah dan Daerah Tingkat dua Maluku Tenggara.

Tindak lanjut dari pada pertemuan itu dilaksanakan suatu pertemuan untuk menetapkan Ibu Kota Daerah tingkat dua Maluku Tenggara. Pertemuan ini kemudian menimbulkan perdebatan diantara peserta yang hadir dalam rangka penetapan Ibu Kota tersebut. muncul keinginan untuk menentukan Saumlaki sebagai Ibu Kota Daerah Tingkat dua Maluku Tenggara, namun keinginan ini ditolak dan menetapkan Tual sebagai Ibu Kota Daerah Tingkat dua Maluku Tenggara. Pada Tahun 1958 Tual secara Yuridis Formal ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Undang-undang No 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swasantara II Maluku yang didalamnya terdapat Daerah Tingkat Dua Maluku Tenggara dengan Ibu Kota Tual yang membawahi 8 kecamatan masing-masing; Kecamatan P.P.Terselatan, Kecamatan Letti Moa Lakor, Kecamatan P.P. Babar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan P.P.Aru.

Dalam masa orde baru Tual cukup mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan beberapa Kabupaten-kabupaten lain yang ada dalam wilayah Provinsi Maluku. Dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Kabupaten Tual memiliki peranan yang sangat strategis untuk membawahi daerah-daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan sulit dijangkau akibat faktor geografis daerah ini yang lebih didominasi oleh laut. Sebagai Ibu Kota Kabupaten Tual juga dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat modernisasi yang dituju untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang dipandang lebih baik. Dalam masa ini pula banyak dibangun sejumlah fasilitas perkantoran dan pendidikan serta sarana-sarana umum lainnya untuk menunjang berbagai pelayanan publik kepada masyarakat.

Setelah berhembusnya angin Reformasi yang didorong oleh kelompok mahasiswa di tahun 1998 dan runtuhnya Rezim Orde Baru yang menghendaki

adanya perubahan dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini membawa perubahan dan angin segar bagi seluruh daerah yang ada di Nusantara untuk menikmati suatu kehidupan yang otonom serta lebih baik. Perubahan itu ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang sistim pemerintahan daerah. Undang-undang ini kemudian memberikan ruang untuk dibentuknya daerah-daerah baru yang lebih bersifat otonom dan mandiri dalam mengatur dan mengelola keuangan dan pemerintahannya.

Kabupaten Maluku Tenggara dengan Ibu Kota Tual secara berturut-turut kemudian memekarkan dua Kabupaten baru pada Tahun 2000 yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Saumlaki dan Kabupaten Aru pada Tahun 2004 dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Dobo. Dengan demikian luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara semakin kecil. Perjalanan pemekaran wilayah pada Kabupaten Maluku Tenggara tidak berhenti sampai disini, namun pada tanggal 10 Juli 2007 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 31 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kota Tual. Dengan sendirinya Kota Tual resmi menjadi daerah yang otonom dan terlepas dari wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai konsekuensi dari pemekaran Kota Tual tersebut maka pada tanggal 14 Juli 2009 telah disetujui rancangan peraturan daerah tentang penetapan Kota langgur sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara (sekarang). Dalam pemekaran itu wilayah Kota Tual membawahi empat kecamatan yaitu;

1. Kecamatan Pulau Dullah Utara dengan Ibu Kota Namser
2. Kecamatan Pulau Dullah Selatan dengan Ibu Kota Tual
3. Kecamatan Pulau-pulau Kur dengan Ibu Kota Fatbuak
4. Kecamatan Tayando-Tam dengan Ibu Kota Yamtel.

d. Terbentuknya Kota Tual

Reformasi politik yang terjadi dalam masa reformasi membawa perubahan yang mendasar dalam sejarah perjalanan perpolitikan dan pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun di Daerah. Perubahan ditingkat Pusat ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Rezim Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto. Perubahan dan penambahan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah konsekuensi logis yang lahir dari desakan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan politik dan pemerintahan yang dimotori oleh kelompok intelektual di Negeri ini. Perwujudan yang sama juga dilakukan masyarakat di Daerah yang menghendaki adanya suatu perubahan melalui tuntutan otonomi daerah yang diperbesar dan pemekaran wilayah telah melahirkan dinamika politik diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tuntutan pemekaran wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara dimulai dengan dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Kota Tual sebagai suatu wilayah yang otonom. Sistem pemerintahan di masa Orde Baru yang cenderung mengedepankan asas sentralistis menimbulkan rasa ketidak nyamanan oleh tokoh-tokoh di daerah turut menjadi pendorong yang kuat untuk melahirkan suatu proses otonomisasi daerah selain itu keinginan daerah untuk mendapatkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar serta upaya untuk memperpendek rentan kendali dalam upaya menjawab berbagai pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini tidak terjangkau akibat luas wilayah yang terlampau besar.

Suatu proses pemekaran tidak semata-mata terjadi dengan sendirinya melainkan melalui suatu proses perjuangan yang memiliki suka duka, pro dan kontra sebagai suatu rentetan proses menuju pemekaran itu sendiri. Proses pemekaran Kota Tual di motori oleh Hi.M.M.Tamher yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Walikota Tual sekarang). Proses perjuangan diawali dengan upaya mendapatkan persetujuan Bupati sebagai suatu persyaratan untuk pengajuan pemekaran wilayah. Proses ini berlangsung cukup lama hal ini dikarenakan selama kepemimpinan Bupati Herman Koedoeboen yang tidak menghendaki adanya proses pemekaran. Keinginan untuk menjadikan Tual sebagai suatu daerah otonom dengan sendirinya mendapat tantangan dari Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Proses persetujuan untuk mendapatkan pemekaran mendapat titik terang setelah masa kepemimpinan Bupati Herman Koedoeboen berakhir dan jabatan kepala daerah dijabat oleh Pelaksana Tugas. Momen ini dimanfaatkan secara baik oleh kelompok pemekaran untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Maluku Tenggara perjuangan terus dilakukan oleh kelompok pro pemekaran untuk mendapat persetujuan DPRD Maluku Tenggara. Perjuangan diplomasi untuk mendapatkan persetujuan DPRD Maluku Tenggara menimbulkan perbedaan pendapat dan kepentingan dalam tubuh DPRD Maluku Tenggara yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok pro pemekaran, kelompok anti pemekaran dan kelompok moderat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan perhelatan panjang dalam dinamika politik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Proses ini kemudian menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat Maluku Tenggara dalam kelompok pro pemekaran dan kelompok anti pemekaran.

Perbedaan-perbedaan pendapat pro dan kontra yang muncul dalam proses pemekaran Kota Tual masing-masing memiliki argumentasi antara lain, pro pemekaran memiliki argumentasi bahwa pemekaran bertujuan memberikan

kesejahteraan kepada rakyat, bertambahnya pusat pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kucuran dana dari pusat ke daerah, terbukanya lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja khususnya anak daerah dan keinginan untuk menjadikan Kota Tual sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Tenggara Raya. Alasan ini kemudian mendapat simpati dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya Raja Dullah, tokoh-tokoh Agama dan tokoh-tokoh pemuda.

Disisi lain kelompok anti pemekaran bersikukuh untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan tiga alasan yang diajukan yaitu antara lain; dapat memicu konflik agama, dapat merusak tatanan adat yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Kei secara keseluruhan dan memecahbelah persatuan dan kesatuan masyarakat. Perbedaan prinsip antara kelompok pro pemekaran tidak dapat dihindari dalam rapat parlemen maupun diluar parlemen, hal ini sebagai suatu dampak dari proses dinamika politik yang terjadi. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh parlemen berjalan alot dan penuh dengan liku-liku. Langkah-langkah strategis terus diupayakan oleh kelompok pro pemekaran dengan menggalang solidaritas dan dukungan politik dari partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD Maluku Tenggara dan sejumlah tokoh-tokoh agama dan raja-raja.

Perjuangan kelompok pro pemekaran secara perlahan mendapat simpati dari berbagai kalangan khususnya kelompok yang moderat (ragu-ragu) dalam parlemen yang akhirnya menyatakan sikap untuk bergabung dengan kelompok pro pemekaran sehingga dalam pengambilan keputusan di parlemen kelompok pemekaran memiliki jumlah suara yang lebih dominan. Dengan mendapat persetujuan parlemen, perjuangan kelompok pro pemekaran terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan luhurnya walaupun dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara de jure harus menghadapi Rezim yang berkuasa sebagai suatu konsekuensi yang mesti dihadapi.

Proses pengkajian dan penyusunan calon Kota Tual sebagai suatu data autentik dengan mengedepankan fakta-fakta yang nyata sebagai suatu kajian yang merupakan syarat untuk dibahas dan dipertimbangkan serta ditetapkan sebagai sebuah daerah yang otonom. Proses ini dipersiapkan secara baik dan matang dengan melampirkan syarat-syarat utama pembentukan suatu daerah otonom yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, jumlah desa dan dusun, batas-batas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam proses untuk mendukung terbentuknya Kota Tual sebagai daerah yang otonom.

Perjuangan untuk memekarkan diri dari kabupaten Maluku Tenggara terus mendapat tantangan dari berbagai pihak, walaupun telah mengantongi persetujuan kepala daerah dan DPRD Maluku Tenggara. Salah satu tantangan yang dihadapi kelompok pro pemekaran ialah terhambatnya persetujuan Gubernur dengan alasan yang dapat diterima yaitu persyaratan politik, keamanan, kemampuan ekonomi hingga persoalan administrasi. Hal ini menimbulkan kegelisahan yang besar dalam tubuh kelompok pro pemekaran, namun tidak mengendorkan semangat kelompok pro pemekaran dengan melakukan beberapa langkah strategis yaitu dilakukannya lobi oleh tokoh pro pemekaran bersama-sama dengan elemen masyarakat yang turut mendukung proses pemekaran yang pada saat itu diwakili oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk meyakinkan Gubernur Maluku akan kesiapan Kota Tual untuk menjadi daerah yang otonom.

Selain lobi yang dilakukan oleh kelompok pro pemekaran bersama dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, juga dilakukan suatu sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Dullah dengan memasang tanda sasi berupa pemasangan tumbak kelapa di jembatan Watdek yang menghubungkan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Pemasangan tanda sasi ini dilakukan oleh Raja Dullah sebagai bentuk keridakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan kelompok anti pemekaran yang secara sengaja menghalang-halangi proses pemekaran. Pemasangan tanda sasi di jembatan Watdek dengan tujuan menutup seluruh akses masuk dan keluar dari dan ke Kota Tual, akibatnya seluruh aktifitas pemerintahan, pendidikan dan layanan publik lainnya menjadi terhambat. Proses sasi ini dikawal oleh kaum wanita.

Proses pemasangan sasi ini memberikan dampak yang positif bagi perjuangan kelompok pro pemekaran yang pada akhirnya mendapat persetujuan dari Gubernur Maluku. Sebagai komitmen Raja Dullah bersedia mencabut tanda sasi yang dipasang. Dengan diperolehnya persetujuan Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku maka perjuangan Diplomasi dilanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu persetujuan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Undang-undang pemekaran Kota Tual. Perjuangan dan penantian panjang kelompok pro pemekaran dan masyarakat Kota Tual akhirnya menjadi suatu kenyataan dengan dikeluarkannya Undang-undang No 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di provinsi Maluku pada tanggal 10 Agustus 2007.

Pada tanggal 18 Desember 2007 Kota Tual diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta sekaligus melantik Pejabat Walikota Tual Bapak Drs. Johanis Patinama untuk melaksanakan tugas-tugas kepala daerah dan mempersiapkan

proses kepala daerah yang defenitif. Pada bulan Agustus 2008 seluruh elemen masyarakat di Kota Tual melaksanakan suatu pesta demokrasi yang pertama kalinya untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif. dalam proses pemilihan ini Drs. Hi. M. M. Tamher dan A. Rahayaan, S. Ag terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang pertama kalinya dan dilantik oleh Gubernur Maluku (Bapak Karel Albert Ralahalu) pada tanggal 4 Oktober 2008.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Jaringan perdagangan rempah-rempah di masa lalu yang menghubungkan Benua Eropa dengan negara-negara di Timur Asia turut mengekspos nama Maluku dalam rute pelayaran itu. Terbentuknya jalur perdagangan ini tak lain dan tak bukan hanya untuk mencari dan menemukan kepulauan rempah-rempah (*Spice Island*). Kepulauan rempah-rempah menjadi tujuan utama ekspedisi Bangsa-bangsa Eropa dan Bangsa-bangsa di Timur Asia. Berbagai ekspedisi telah dilakukan namun belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Portugis merupakan Bangsa Eropa pertama yang berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Penemuan ini kemudian membuka babakan sejarah baru dalam Historiografi Indonesia. Akulturasi dan penetrasi budaya merupakan suatu fakta sejarah yang akan tetap hidup dalam kehidupan masyarakat di Nusantara pada umumnya dan Maluku pada khususnya.

Tual, merupakan salah satu daerah yang ada di kepulauan Maluku dan menyimpan berbagai dinamika sejarah dan budaya yang menarik untuk dirangkai menjadi suatu historiografi dalam sejumlah deretan historiografi di Nusantara. Historiografi Kota Tual yang dibahas dalam penulisan ini mengungkap berbagai peristiwa sejarah dan budaya yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat di kepulauan Kei pada umumnya dan Kota Tual khususnya. Masuknya pendatang dari luar kepulauan Kei (Tual) mampu menembusi entitas sosial masyarakat yang ada di kepulauan Kei. Terbentuknya dua kelompok besar dalam kehidupan masyarakat Kei (*Ur Siu dan Lor lim*) serta terbentuknya hukum adat *Larwul Ngabal* merupakan bukti sejarah pengaruh para pendatang dari Bali, Seram, Papua, Flores dan daerah-daerah lain yang kemudian menetap sebagai penduduk asli di kepulauan Kei. Hukum adat *Larwul Ngabal* merupakan suatu fondasi sosial yang hingga kini bersifat mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat adat di kepulauan Kei.

Masuknya Bangsa-bangsa luar ke Maluku turut memberikan dampak dalam kehidupan Masyarakat di kepulauan Kei. Munculnya kebudayaan baru dalam bentuk agama dan kepercayaan merupakan suatu bukti sejarah kehadiran orang-

orang luar di kepulauan Kei. Pengaruh kebudayaan Islam di bawah oleh para pedagang Islam dan para mubalig yang datang untuk menyebarkan Agama Islam, sedangkan kebudayaan Katolik dan Protestan di bawah oleh Bangsa portugis dan Belanda yang pernah menginjakan kaki di kepulauan Kei. Munculnya salah satu kekuatan baru di Asia dengan gerakan 3A yang dipelopori oleh Jepang menjadi suatu babakan sejarah yang cukup memilukan bagi masyarakat di Kepulauan Kei dengan terbunuhnya para misionaris yang datang untuk memberitakan Injil di Kepulauan Kei.

Setelah bangsa Indonesia mencapai masa kemerdekaan Kepulauan Maluku Tenggara merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah Daerah Maluku Selatan. Dengan letak geografis yang cukup jauh dari Ambon sebagai Ibu Kota Derah Maluku Selatan serta kurangnya sarana dan prasarana transportasi mendorong beberapa tokoh asal Maluku Tenggara yang duduk dalam Dewan Maluku untuk memperjuangkan Daerah Maluku Selatan dibagi dua yaitu Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Perjuangan parah tokoh-tokoh asal Maluku Tenggara ini mendapat respon dari Gubernur yang menumpang kapal kasimbar mengunjungi Maluku Tenggara. Pada kesempatan kunjungan itu Gubernur mengundang tokoh-tokoh asal Maluku Tenggara untuk menjelaskan persetujuannya atas keinginan pembagian wilayah seperti yang diusulkan oleh tokoh-tokoh asal Maluku Tenggara.

Pada tahun 1958 Kota Tual secara juridis formal resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swastara II di Maluku yang termasuk didalamnya Kabupaten Maluku Tenggara ada dengan membawai delapan Kecamatan. Setelah berhembusnya angin reformasi yang didengungkan oleh mahasiswa dan masyarakat di Negeri ini yang menghendaki adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya resim orde baru. Hal yang sama terjadi di daerah-daerah yang menghendaki adanya otonomisasi yang ditandai dengan pemekaran Daerah.

Pada Tahun 2000 Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Ibu Kotanya Saumlaki. Proses pemekaran terus berlanjut pada Tahun 2004 Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi terlepas dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dengan Ibu Kotanya Dobo. Pemekaran Kepulauan Aru menjadi inspirasi bagi Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda Tual untuk memperjuangkan Kota Tual

sebagai Daerah yang otonom. Perjuangan untuk memperoleh pemekaran mendapat tantangan yang begitu besar baik dalam perhelatan di parlemen maupun menghadapi penguasa. Pada tanggal 10 Agustus 2007 menjadi momentum bersejarah bagi perjuangan Tokoh-tokoh pejuang pemekaran dan masyarakat kota Tual dengan di keluarkannya Undang-undang No 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Sejak itulah Kota Tual secara de jure resmi menjadi daerah yang otonom.

2. Saran

- a. Penelitian ini masih bersifat penelitian awal, untuk itu masih diperlukannya suatu kajian yang mendalam mengenai sejarah Kota Tual dan melibatkan berbagai elemen yang terkait sehingga tercipta suatu historiografi mengenai Kota Tual yang benar-benar akurat.
- b. Masih kurangnya historiografi mengenai Tual secara khusus dan Kepulauan Kei secara umum, untuk itu penulis mengharapkan perlu ditingkatkannya kajian-kajian sejarah maupun budaya untuk mengungkap tabir sejarah masa lalu Kota Tual dan Kepulauan Kei secara umum mulai dari masa perdatangan rempah-rempah hingga sekaramg ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Paramita R, *Bunga Angin Portugis di Indonesia: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia*, LIPI Press bekerjasama dengan Asosiasi Persahabatan dan Kerja Sama Indonesia-Portugal da Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008.
- Pattikayhatu.J.A, dkk, *Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Ambon 1998.
- _____, *GPM dan Islam Dalam Lintasan Sejarah: Makalah Pada Seminar Sejarah Gereja Protestan Maluku di Ambon 10-11 Oktober 2008*.
- Usman Thalib, dkk, *Dunia Maritim Orang Banda Neira*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, 2006.
- M. Wakim, *Banda Dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, 2011
- Panduan Lawatan Sejarah Daerah Maluku VIII Tahun 2009 Tual-Maluku Tenggara, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon 2009
- Hi. M.M.Tamher, *Sekilas Sejarah Lahirnya Kota Tual: Catatan Tangan Walikota Tual*.